

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSAMPAHAN DI KOTA SEMARANG

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Pascasarjana Universitas Diponegoro
Program Studi: Magister Ilmu Administrasi
Konsentrasi: Magister Administrasi Publik**



Diajukan Oleh :

**S U T A R T O
D4E.002049**

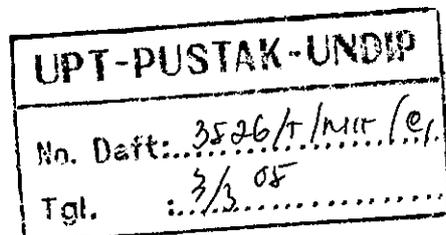
**PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2004**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 29 Maret 2004


SUTARTO



LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSAMPAHAN
DI KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nama Penulis : **S U T A R T O**
NIM : D4E002049

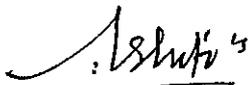
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal : 29 Maret 2004

Pembimbing I



Drs. Yusmilarso, MA

Pembimbing II



Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si

Penguji I



Dra. Dyah Hariani, MM

Penguji II



Drs. Sundarso, SU

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Sain
Tanggal : 29 Maret 2004

Ketua Program Studi M.AP



Prof. Dr. Warella, M.P.A., Ph.D

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto : Dalam hidup jadilah sebilah keris, tersimpan dalam selimut indah, jangan biarkan lepas, karena akan menusuk diri sendiri.

Persembahan :

1. Istri tercinta **Yuningsih**, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan moril.
2. Anakku tersayang , **Taufiq, Oki dan Enggar**.
3. Siapa saja yang mencintaiku dan memberikan dorongan dan motivasi selesainya studi.

Abstract

To the number of urban community activity, will bring negative impact or problems to its growth. One problems is the problem of garbage. Town of Semarang in realizing password as ATLAS town (Peaceful, Order, Fluent, Asri and is Healthy) have executed various activity and program. However along with efforts of implementation policy of garbage by Government Town in Semarang still not yet is optimal. Still not yet is optimal of that in management of garbage because lack of process trasmisi policy handling of garbage, lack clarity target group / society in accepting information, less adequate it government officer communications executor of hygiene, lack of hygiene facilities and basic facilities, low of that mount society participation and less inwrought its in handling of garbage. So that which will reach in this research to analyse communications of relation, society participation and resource with implementation policy of garbage in Town of Semarang.

Data type which used in this research in the form of obtained primary data of government officer executor of policy of garbage in Town of Semarang counted 66 data and responder of sekunder obtained of document data related to research. While technique analyse data the used is with analyse correlation..

Result of research indicate that all raised hypothesis this research accepted. As for recommendation able to be peeped out in this research that necessary for Governmental side in Town of Semarang in running implementation policy of garbage to pay attention variables or factors tested influencing it in order to getting result of more better. Outside variable tested, do not less important so tha policy of garbage can walk better, existence of political support and komitmen by konkrit either from executive elite and also is legislative of Government in Town of Semarang.

Abstraksi

Banyaknya aktivitas masyarakat kota, akan membawa permasalahan atau dampak negatif bagi perkembangannya. Salah satu permasalahan tersebut adalah masalah persampahan. Kota Semarang dalam mewujudkan semboyan sebagai kota ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri dan Sehat) telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Akan tetapi seiring dengan upaya-upaya tersebut implementasi kebijakan sampah oleh Pemerintah Kota Semarang masih belum optimal. Masih belum optimalnya dalam pengelolaan sampah dikarenakan kurangnya proses transmisi kebijakan penanganan sampah, kurangnya kejelasan kelompok sasaran/masyarakat dalam menerima informasi, kurang memadainya komunikasi aparat pelaksana kebersihan, kurangnya sarana dan prasarana kebersihan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan kurang terpadunya dalam penanganan sampah. Sehingga yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisa hubungan komunikasi, sumber daya dan partisipasi masyarakat dengan implementasi kebijakan sampah di Kota Semarang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dari aparat pelaksana kebijakan persampahan di Kota Semarang sebanyak 66 responden dan data sekunder yang diperoleh dari data dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis korelasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis yang diajukan pada penelitian ini diterima. Adapun rekomendasi yang dapat dimunculkan dalam penelitian ini adalah bahwa penting bagi pihak Pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan implementasi kebijakan persampahan untuk memperhatikan faktor-faktor atau variabel-variabel teruji yang mempengaruhinya dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik. Di luar variabel teruji, tidak kalah pentingnya agar kebijakan persampahan dapat berjalan dengan baik, adanya komitmen dan dukungan politik secara konkrit baik dari elit eksekutif maupun legislatif Pemerintah Kota Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini.

Tesis yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSAMPAHAN DI KOTA SEMARANG”, ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat S-2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Program Studi Magister Administrasi Publik, Konsentrasi Magister Administrasi publik.

Tesis ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya bantuan secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terimakasih pertama untuk Prof. Ir. Eko Budihardjo M.Sc selaku rektor Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang.

Tidak lupa sebagai rasa kormat penulis, terima kasih juga penulis haturkan kepada :

1. Drs. Yusmilarso, MA dan Dra. Retno Sunu Astuti, M.Si; selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal penulisan sampai akhir penulisan tesis ini, yang banyak memberikan referensi penulisan tesis ini pula.
2. Para Guru Besar pada Program Magister Administrasi Publik :

Prof. Drs. Y. Warella, MPA, PhD, Prof. Dr. Soeyudi, SE., Prof. Dr. Sudharto, PH, MES, dan Prof. Dr. Miyasto, SU dan semua Dosen yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

3. Segenap rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Administarsi Publik dan seluruh staf Administrasi Sekretariat Program Magister Administarsi Publik Universitas Diponegoro Semarang.

Selanjutnya dukungan moril istri penulis, Yuningsih, selama menulis teisis ini sungguh tak ternilai. Sulit membayangkan penulis bisa menyelesaikan karya ini tanpa jerih payah dan pengorbanannya, maka dia layak memperoleh penghargaan setinggi tingginya. Anak-anak penulis, Taufiq, Oki dan Enggar telah membantu penulis menciptakan suasana bahagia dan gembira. Peluk dan kasih sayang Ayah untuk mereka semua, semoga mereka menjadi anak-anak soleh dan pecinta ilmu pengetahuan kelak kemudian hari.

Kata pepatah “tiada gading yang takretak”. Demikian pula dengan tesis ini dengan penuh kerendahan hati penulis akui bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan itu karena kenaifan penulis. Akhirnya saran maupun kritik demi penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan dari para pembaca budiman. Mudah-mudahan tesis ini memberikan manfaat bagi pembaca budiman dan menjadi amal sholeh penulis disisi Allah taala. Amin.

Semarang, 29 Maret 2004

Penulis,

SUTARTO

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAKSI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	10
1. Identifikasi Masalah.....	10
2. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	14
1. Kebijakan Publik.....	14
2. Implementasi Kebijakan.....	18
2.1. Komunikasi (X1).....	30
2.2. Sumber Daya (X2).....	36

2.3. Partisipasi (X3).....	39
B. Hipotesis.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian/ Perspektif Pendekatan Penelitian	48
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	49
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Variabel Penelitian.....	50
E. Jenis dan Sumber Data.....	54
F. Instrumen Penelitian.....	55
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	56
H. Teknik Pengumpulan Data.....	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	65
A.1. Implementasi Kebijakan.....	65
A.2. Komunikasi.....	80
A.3. Variabel Sumber Daya.....	88
A.4. Variabel Partisipasi.....	98
B. Hubungan Antar Variabel yang Diuji	108
B.1. Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan Persampahan.....	110
B.2. Hubungan Variabel Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan Persampahan.....	113
B.3. Hubungan Variabel Partisipasi Masyarakat dengan Implementasi Kebijakan Persampahan.....	115
B.4. Hubungan Komunikasi, Sumber Daya dan Partisipasi dengan Implementasi Kebijakan Persampahan.....	117
C. Diskusi.....	118

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan.....	121
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Tabel Jumlah Perkembangan Penduduk Kota Semarang Tahun 1998 –2002	4
Tabel I.2 : Jumlah Sarana Kebersihan Kota Semarang	6
Tabel I.3 : Data Produksi/Timbangan Sampah Rata-rata Perhadri (dalam m ³) Berdasarkan Sumbernya Di Kota Semarang Tahun 1998 – 2002 ...	7
Tabel I.4 : Data Jumlah Pegawai Dinas Kebersihan Kota Semarang Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel III.1 : Daftar Wilayah Kecamatan/Kelurahan yang Memperoleh Pelayanan Kebersihan.....	50
Tabel III.2 : Aparat Pelaksana Kebijakan Persampahan Di Kota Semarang yang Dijadikan Populasi Dalam Penelitian	57
Tabel IV.1 : Pemahaman Terhadap Implementasi Kebijakan Persampahan	66
Tabel IV.2 : Pemahaman Manfaat Implementasi Kebijakan Persampahan.....	67
Tabel IV.3 : Pemahaman Tujuan Implementasi Kebijakan Persampahan.....	69
Tabel IV.4 : Tingkat Kemampuan Aparat Pelaksana Kebersihan dalam Menterjemahkan Isi Implemenntasi Kebijakan Persampahan.....	70
Tabel IV.5 : Pengangkutan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Kota.....	71
Tabel IV.6 : Frekuensi Pengambilan Sampah.....	73
Tabel IV.7 : Kondisi Kebersihan Kota Semarang.....	74
Tabel IV.8 : Masyarakat Kota Telah Melaksanakan Budaya Bersih	76
Tabel IV.9 : Kesesuaian Retribusi Kebersihan dengan Perda.....	77
Tabel IV.10 : Kenaikan Retribusi Kebersihan	78
Tabel IV.11 : Sanksi Terhadap Warga yang Membuang Sampah Di Sembarang Tempat.....	79

Tabel IV.12	: Pemahaman Tentang Intensitas Pemkot Dalam Penyampaian Informasi Kebijakan Kebersihan	80
Tabel IV.13	: Kejelasan Informasi Kebijakan Penanganan Sampah.....	82
Tabel IV.14	: Konsistensi Informasi Tentang Kebijakan Penanganan Sampah.....	83
Tabel IV.15	: Intensitas Penggunaan Media Massa dalam Sosialisasi Tentang Program Kebersihan	84
Tabel IV.16	: Pemahaman Tentang Kebijakan kebersihan Kota	85
Tabel IV.17	: Perlunya Saresehan K3 dengan Menghadirkan Pejabat Pemkot Semarang	86
Tabel IV.18	: Adanya Kritik dan Saran terhadap Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang.....	88
Tabel IV.19	: Pendidikan Formal yang Dimiliki Aparatur Pelaksana Kebijakan Kebersihan	89
Tabel IV.20	: Pemanfaatan Pendidikan Formal yang Dimiliki Aparatur Pelaksana Kebijakan Kebersihan.....	90
Tabel IV.21	: Pengetahuan Dari Aparatur Kebijakan Kebersihan Tentang Penanganan Sampah	91
Tabel IV.22	: Pemahaman Tugas dan Tanggung Jawab dari Aparatur Pelaksana Kebijakan.....	92
Tabel IV.23	: Sarana dan Prasaran Penunjang Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kebersihan	93
Tabel IV.24	: Biaya Operasional Untuk Kebersihan Pengendalian Sampah	95
Tabel IV.25	: Fasilitas Umum Kebersihan Kota Yang Disediakan Pemkot.....	96
Tabel IV.26	: Peran KSM yang Telah Dibentuk Dalam Penyapuan Jalan	97
Tabel IV.27	: Intensitas Kris dan Saran Masyarakat Kepada Pemkot Dalam Pelayanan Kebersihan.....	99
Tabel IV.28	: Tingkat Keseringan Masyarakat dalam Menyusun Program/ gagasan/ Ide	100

Tabel IV.29 : Partisipasi Masyarakat Dalam Penyediaan Sarana kebersihan / Tong Sampah.....	102
Tabel IV.30 : Partisipasi Dukungan Dana Masyarakat Guna Menunjang Program Kebersihan	103
Tabel IV.31 : Partisipasi Masyarakat Dalam Bentuk Material Dalam Penanganan Sampah.....	104
Tabel IV.32 : Intensitas keaktifan Masyarakat Dalam Kerja Bakti K3	105
Tabel IV.33 : Tingkat Penyerapan Masyarakat terhadap Informasi Kebijakan Tentang Penanganan Sampah/ Kebersihan.....	106
Tabel IV.34 : Efektivitas KSM Kebersihan Yang telah Dibentuk dalam Upaya Penanganan Sanpah/ Kebersihan.....	108
Tabel IV.35 : Uji Normalitas.....	109
Tabel IV.36 : Hubungan Komunikasi dan Implementasi Kebijakan Persampahan	112
Tabel IV.37 : Signifikansi Kendall's Tau-B	113
Tabel IV.38 : Hubungan Sumber Daya dan Implementasi Kebijakan Persampahan.....	114
Tabel IV.39 : Signifikansi Kendall's Tau-B	115
Tabel IV.40 : Hubungan Partisipasi dan Implementasi Kebijakan Persampahan.....	116
Tabel IV.41 : Signifikansi Kendall's Tau-B	117
Tabel IV.42 : Hubungan Antara variabel Komunikasi, Sumber Daya dan Partisipasi Terhadap Implementasi Kebijakan Persampahan	118

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Proses Implementasi Kebijakan.....	19
Gambar II.2 : Variabel-Variabel Implementasi Kebijakan Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier.....	21
Gambar II.3 : Tingkat Partisipasi Menurut David Wilcox.....	23
Gambar II.4 : Model Kesesuaian.....	24
Gambar II.5 : Variabel Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III.....	26
Gambar II.6 : Skema Teori Variabel-variabel yang Memengaruhi Implementasi Kebijakan Persampahan Di Kota Semarang.....	29
Gambar II.7 : Bagan Geometical Hipotesis Penelitian.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kisi-kisi Yang Diperlukan Untuk Mengukur Implementasi Kebijakan Persampahan, Komunikasi, Sumber Daya dan Partisipasi
- Lampiran 2 Data Penelitian
- Lampiran 3 Uji Normalitas data
- Lampiran 4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
- Lampiran 5 Hasil Kros Tabulasi Variabel Independen dan Dependen
- Lampiran 6 Koefisien Korelasi Rank Kendall Tau
- Lampiran 7 Korelasi Berganda

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota pada umumnya merupakan pusat sebagian besar kegiatan perekonomian, perdagangan, industri, pemerintahan maupun pendidikan. Terpusatnya berbagai kegiatan itu membawa konsekuensi bahwa sebagian besar aktivitas manusia berada di kota. Kota juga menimbulkan adanya kelompok urban atau pendatang dari kota lain yang setiap saat menambah permasalahan perkotaan.

Semakin bertambahnya aktivitas manusia di perkotaan membawa dampak meningkatnya tuntutan masyarakat kota akan pentingnya harapan hidup lebih tinggi, sejahtera, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan. Masyarakat kota menyadari bahwa kota yang menjadi hunian dan tempat mencari kehidupan setiap hari harus bisa memenuhi setiap kepentingan warganya. Oleh sebab itu yang menjadi tuntutan masyarakat kota adalah perkembangan dan kemajuan kota.

Perkembangan kota bisa juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat apabila sosial ekonomi masyarakat tidak seimbang karena beragamnya sumber pendapatan, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat pencemaran atau populasi udara, menurunnya kualitas lingkungan hidup karena pencemaran air limbah dan lain-lain. Pemerintah membentuk Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT), dengan tujuan agar terbentuk lingkungan yang sehat dan tidak kumuh.

Di Indonesia, dengan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam derajat tertentu memberi harapan baru terhadap perkembangan desentralisasi dan akan meningkatkan akuntabilitas para pejabat daerah pada publiknya. Adalah suatu hal tidak dipungkiri lagi bahwa telah terjadi pergeseran tuntutan tugas-tugas pemerintah. Sejalan dengan desentralisasi maka tugas-tugas pemerintah kini lebih memungkinkan dilaksanakan oleh daerah, dengan harapan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat akan lebih cepat diwujudkan mengingat lebih dekatnya pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Demikian halnya dengan Kota Semarang, sebagai ibukota Propinsi Jawa Tengah dalam era otonomi daerah ini telah mampu melaksanakan semua kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah secara mandiri dan akuntabel termasuk dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Sebagai kota yang berada di jalur utama pantai utara Pulau Jawa di masa mendatang kota Semarang akan dapat berkembang pesat. Menjadi kota metropolitan seirama dengan laju pertumbuhan pembangunan, terutama pada sektor industri, sektor perdagangan dan jasa maupun pendidikan.

Seperti halnya kota-kota besar lain, Semarang mengalami pesatnya perkembangan kota. Ketersediaan lahan untuk pemukiman yang terbatas, pencemaran air dan udara, menurunnya kualitas lingkungan hidup, masuknya air laut ke kawasan pemukiman (rob), gangguan kesehatan masyarakat sebagai akibat pencemaran industri maupun rumah tangga dan besarnya produksi sampah dalam setiap harinya hingga mencapai $\pm 3500 \text{ m}^3$ dan beberapa permasalahan sebagai akibat kompleksitasnya permasalahan perkotaan.

Tuntutan masyarakat kota tersebut telah direspon dan dijabarkan oleh Pemerintah Kota dalam bentuk Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) yang meliputi delapan sektor prasarana yaitu: Pengadaan air bersih, Air limbah, Persampahan, Sistem drainase, Pengendalian Banjir dan Perumahan Rakyat serta KIP (Kampung Improvement Project) dan MIP (Market Improvement Project).

Dari sekian banyak permasalahan kota, satu di antaranya disebabkan oleh aktivitas hampir seluruh manusia adalah masalah persampahan. Di manapun manusia bertempat tinggal, dari berbagai tingkat usia, pendidikan maupun sosial ekonominya mereka adalah penghasil sampah baik disadari atau tidak. Masalah kebersihan kota atau pengelolaan persampahan di Kota Semarang menjadi perhatian utama pemerintah kota, terlebih karena Kota Semarang pernah menyandang sebagai peraih Adipura Kencana. Secara geografis maupun secara klimatologis Kota Semarang, bisa dikatakan kurang menguntungkan karena karakter tumbuhan di daerah pantai utara. Daun mudah kering dan gugur karena suhu udaranya relatif tinggi mengakibatkan produk sampah yang berasal dari tumbuhan/penghijauan cukup besar. Kota Semarang yang dilintasi kali besar dan beberapa anak sungai yaitu Kali Banjir Kanal Timur, Kali Semarang dan beberapa saluran sekunder yang membelah Kota Semarang dari arah selatan ke utara berakibat pada besarnya sampah kota yang dibuang ke sungai oleh warga sekitar sungai, di samping penggunaan saluran sebagai tempat pembuangan tinja secara tradisional.

Kota Semarang pada wilayah tertentu sangat padat. Adanya 4 kawasan perumnas dan 51 proyek perumahan dengan masing-masing jumlah unit rumah

terbangun bervariasi antara 100-10.000 unit rumah di kawasan pengembangan kota, mengakibatkan pula membengkaknya produk sampah yang tidak dapat dikelola sendiri oleh warganya karena keterbatasan lahan pekarangan sehingga menimbulkan besarnya sampah perkotaan, yang rata-rata setiap keluarga 0,020 m³ dalam setiap harinya.

Tabel I.1

Tabel Jumlah Perkembangan Penduduk Kota Semarang Tahun 1998 – 2002

NO	WILAYAH KECAMATAN	TAHUN				
		1998	1999	2000	2001	2002
1	Mijen	36.442	36.860	37.377	37.927	38.843
2	Gunungpati	55.569	56.268	56.901	57.482	58.130
3	Banyumanik	97.775	99.564	101.935	104.535	106.566
4	Gajah Mungkur	55.366	56.024	56.866	57.479	58.402
5	Semarang Selatan	18.013	77.699	77.771	77.995	84.081
6	Candisari	58.524	62.120	77.628	77.687	78.299
7	Tembalang	91.059	94.514	98.982	103.336	106.083
8	Pedurungan	125.367	129.864	133.680	137.726	141.637
9	Genuk	61.536	59.834	61.291	62.988	63.896
10	Gayamsari	76.531	76.818	62.407	63.129	64.098
11	Semarang Timur	85.288	84.832	84.517	81.508	83.829
12	Semarang Utara	127.360	126.972	127.214	122.658	122.853
13	Semarang Tengah	78.382	77.631	77.150	76.595	76.214
14	Semarang Barat	140.858	143.448	144.833	146.595	148.709
15	Tugu	23.746	22.842	23.895	24.145	24.400
16	Ngaliyan	80.956	83.496	86.221	89.202	92.548
	Jumlah	1.272.092	1.288.786	1.308.310	1.320.990	1.348.588

Sumber BPS Kota Semarang

Dari sekian permasalahan tersebut upaya penanganan secara manajerial serta melibatkan ekosistem pengolahan dan pengelolaan semakin mutlak diperlukan secara terpadu. Dalam upaya mewujudkan kota yang bersih, indah dan sehat atau kota dengan kualitas lingkungan yang baik, maka pemerintah Kota Semarang secara dini telah meletakkan landasan Kota ATLAS yaitu, kota yang maju dan dinamis maupun

dalam suasana Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat. Konsep tersebut mengandung maksud agar Pemerintah Kota tetap dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan penjelasan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, upaya menciptakan kebersihan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari penanggulangan masalah sampah karena terkait satu sama lain. Penanganan/pengolahannya perlu melibatkan banyak pihak serta memerlukan dukungan teknologi, sarana dan prasarana serta dana yang memadai. Selain itu hal yang sangat penting adalah sikap mental dari semua pihak dalam usaha menuju Semarang Kota ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Asri dan Sehat).

Adapun maksud dari sesanti Semarang "KOTA ATLAS" tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Perwujudan dari suatu tatanan kehidupan masyarakat kota Semarang dalam berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang di dalamnya mengandung arti dinamis, meningkat, maju dan berdaya saing, ketika hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari lain.
2. Warga Kota Semarang diharapkan memahami, mengerti dan menghayati atas 5 (lima) aspek kehidupan yang menjadi budaya warga Kota Semarang yaitu Aman, Tertib, Lancar, Asri dan Sehat benar-benar sebagai sarana kemajuan kota.

Dalam mewujudkan semboyan Semarang sebagai Kota ATLAS dalam berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan seperti pembangunan sarana dan prasarana fisik kota. Pembentukan kelembagaan, peningkatan peran dan partisipasi masyarakat maupun pihak ketiga dalam pembangunan Kota Semarang, terlebih dalam

upaya pembangunan sarana kebersihan kota. Akan tetapi seiring dengan upaya-upaya tersebut masih muncul berbagai kendala dan hambatan dialami oleh Pemerintah Kota Semarang adalah:

1. Terbatasnya anggaran kebersihan dan sarana Pengelolaan sampah hal ini disebabkan masih rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) sektor kebersihan. Pada pengelolaan sampah pada tahun 2002 sebesar Rp 11.062.028.000,00 sementara PAD sektor kebersihan hanya mencapai sebesar Rp 4.747.885.228,00. Dan sarana yang dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang dalam menangani pengelolaan kebersihan masih kurang memadai.

Tabel I.2

Jumlah Sarana Kebersihan Kota Semarang

No	Jenis Peralatan	Satuan	Jumlah
1	Armroll Truck	Unit	66
2	Dump Truck Sampah	Unit	15
3	Gerobak dan Becak Sampah	Unit	330
4	Creane	Unit	1
5	Wheel Loader	Unit	3
6	Swamp Dozer	Unit	1
7	Excavator/Back Hoe	Buah	2
8	Kontainer Sampah	Unit	384
9	Tong Sampah	Unit	1000

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Semarang

2. Belum semua wilayah kelurahan se Kota Semarang dapat dilayani oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang. Dari 177 kelurahan yang ada di wilayah Kota Semarang yang belum terlayani sejumlah 57 kelurahan.

Sementara produksi sampah per hari sebanyak $\pm 3.500 \text{ m}^3$, yang terangkut sebanyak 2650 M^3 dan yang tidak terangkut ada sebanyak 850 m^3 .

Tabel I.3

Data Produksi/Timbangan Sampah Rata-rata Perhari (dalam m^3)

Berdasarkan Sumbernya di Kota Semarang Tahun 1998-2002.

NO	SUMBER	1998		1999		2000		2001		2002	
		M^3	%								
1	Pemukiman/Rumah Tangga	1.855	75,71	1.990	75,81	2.250	75,63	2.385	75,71	2.650	75,71
2	Pasar	330	13,47	356	13,56	405	13,61	427	13,56	500	14,29
3	Komersial (Pertokoan, Restoran)	58	2,37	60	2,29	68	2,29	70	2,22	90	2,57
4	Hotel	49	2,00	52	1,98	59	1,98	62	1,97	65	1,86
5	Fasilitas Umum	50	2,04	53	2,02	60	2,02	63	2,00	60	1,71
6	Sapuan Jalan	87	3,55	93	3,54	106	3,56	116	3,68	125	3,57
7	Kawasan Industri	21	0,86	21	0,80	27	0,91	27	0,86	30	0,86
Jumlah		2.450	100	2.625	100	2.975	100	3.150	100	3.500	100

Sumber : Dinas Kebersihan Kota Semarang Tahun 2003

3. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kebersihan. Masih banyaknya anggota masyarakat membuang sampah di lingkungan pemukiman maupun di sungai/saluran. Hal tersebut dikarenakan kurangnya komunikasi atau sosialisasi program kebersihan, terutama bagi warga kota di kawasan pinggiran.
4. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan Anggaran pengelolaan sampah di TPA yang juga terbatas.
5. Pengambilan sampah di lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang berupa bak sampah maupun kontainer sampah belum bisa rutin. Hal ini dapat dijumpai di

berbagai kawasan tertentu misalnya di Pasar Johar, Pasar Karangayu, Pasar Bulu dan di beberapa kompleks perumahan dan perkampungan penduduk.

6. Tidak semua ruas jalan raya disapu setiap hari. Pembersihan jalan raya sebagian diserahkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dana operasionalnya dihimpun dari swadaya masyarakat.
7. Banyak tumbuh Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang menempati fasilitas umum maupun badan jalan raya. Mereka tidak memperhatikan kebersihan dan tidak menyediakan tempat sampah. Hal ini nampak di sepanjang jalan-jalan protokol, kompleks Simpang Lima dan sebagainya. Setelah mereka berjualan tidak memperhatikan sampah atau kebersihannya.

Di samping ketujuh persoalan tersebut di atas, tidak kalah pentingnya adalah keterbatasan sumber daya manusia pengelola persampahan di Kota Semarang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Banyak tenaga pengambil sampah berstatus sebagai Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL). Hal ini sangat mempengaruhi kinerja mereka dalam pengambilan sampah, karena pendapatan mereka relatif kecil, hanya sesuai upah minimal regional. Sekalipun telah diberikan insentif sebagai motivasi kinerja mereka, namun masih belum memadai. Dari jumlah pegawai 150 orang, yang berstatus sebagai PNS sebanyak 86 orang, dan yang berstatus sebagai TPHL sejumlah 64 orang. Dilihat dari kualitas pegawai, rata-rata sumber daya manusia Dinas Kebersihan berpendidikan Sekolah Menengah (SLTP dan SLTA).

Tabel I.4

**Data Jumlah Pegawai Dinas Kebersihan Kota Semarang
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH PNS	%
1	Pasca Sajana (S 2)	3 orang	3,49
2	Sarjana (S 1)	17 orang	19,77
3	Sarjana Muda / Diploma	4 orang	4,65
4	SLTA / Sederajat	34 orang	39,53
5	SLTP / Sederajat	12 orang	13,95
6	Sekolah Dasar	16 orang	18,60
JUMLAH		86 orang	100

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Semarang Tahun 2003

Adapun beberapa hal yang menarik peneliti terhadap pengelolaan sampah di Kota Semarang didasarkan:

1. Dinas Kebersihan Kota Semarang sebagai lembaga publik yang menangani masalah persampahan selama ini belum pernah melakukan penelitian tentang Implementasi Pengelolaan Sampah/Kebersihan di Kota Semarang.
2. Sejak dicanangkan program Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3), belum pernah ada lembaga atau instansi yang mengadakan penelitian pengelolaan kebersihan sampah di Kota Semarang
3. Kota Semarang sebagai kota besar menuju kota metropolitan kawasan pantai merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, karena beberapa keberhasilannya termasuk pernah menerima anugerah Piala Adipura Kencana sebagai penghargaan kota terbersih semasa Orde Baru hingga kini Semarang dapat dipertahankan.

Atas dasar permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengelolaan penanganan sampah di Kota Semarang dengan

mengambil judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERSAMPAHAN DI KOTA SEMARANG.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian di atas, masalah persampahan sangat terkait erat dengan pola pengelolaan sampah dan dipengaruhi oleh unsur-unsur atau faktor-faktor implementasi penanganan sampah. Menurut asumsi penulis secara empiris, yang patut diduga sebagai identifikasi masalahnya adalah :

1. Kurangnya proses transmisi kebijakan penanganan sampah.
2. Kurangnya kejelasan kelompok sasaran/masyarakat dalam menerima informasi.
3. Kurang memadainya komunikasi aparat pelaksana kebersihan.
4. Kurangnya sarana dan prasarana kebersihan.
5. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
6. Kurang terpadunya dalam penanganan sampah.

2. Rumusan Masalah

Masalah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang ada. Agar dalam suatu penelitian dapat lebih jelas dan terarah serta tidak menyimpang dari fokus dan lokus, perlu adanya suatu perumusan masalah. Pengungkapan pokok-pokok pikiran secara jelas dengan sistematis mengenai hakikat suatu permasalahan, akan mempermudah memahami pemecahan masalah. Kegunaan perumusan masalah dimaksudkan sebagai pedoman melakukan langkah-langkah selanjutnya melalui suatu penelitian yang telah dirumuskan.

Dari uraian mengenai latar belakang masalah, penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya yaitu :

1. Apakah kurangnya komunikasi mempengaruhi hubungan yang signifikan dengan implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang ?
2. Apakah kurangnya sumber daya mempunyai hubungan signifikan dengan implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang ?
3. Apakah rendahnya partisipasi masyarakat mempunyai hubungan signifikan dengan implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang ?
4. Apakah kurangnya komunikasi, kurangnya sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat mempunyai hubungan yang signifikan secara bersama-sama dengan implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penyelenggaraan kebersihan/ penanganan sampah di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang.
3. Guna memberikan sumbang saran atau pemikiran upaya-upaya yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi kebersihan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan, di samping untuk mengetahui lebih lanjut tentang implementasi kebijakan pelaksanaan kebersihan di Kota Semarang. Secara umum dapat dilihat seberapa jauh cakupan pengelolaan sampah dibandingkan dengan produksi sampah maupun luas wilayah penelitian. Sedangkan secara khusus dapat dilihat hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kecukupan tenaga kerja, sarana prasarana serta pembiayaan yang dibutuhkan.
- b. Untuk mengetahui berapa besar produk sampah yang dapat ditangani maupun yang belum tertangani sejak proses pewadahan, pengumpulan, pengangkutan sampai ke tempat pembuangan akhir (TPA).
- c. Untuk mengetahui cara pengelolaan sampah serta mekanisme operasional kerjanya.
- d. Mendorong dan melatih peneliti untuk berpikir logis dan meningkatkan daya serap informasi, khususnya mengenai topik yang diteliti.
- e. Melatih mengolah dan menggabungkan beberapa sumber dan menuangkan ke dalam pemikiran yang lebih matang.
- f. Memperoleh kepuasan intelektual karena dapat meningkatkan ketrampilan dalam mengorganisasikan serta menyajikan fakta secara jelas dan sistematis.

Di samping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau acuan dan sebagai pertimbangan Dinas Kebersihan dalam menyusun rencana strategis/program kebersihan Kota Semarang di masa mendatang. Di

samping itu hasil penelitian ini dapat digunakan bahan masukan bagi dinas/instansi/lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta, yang terkait dengan masalah-masalah kebersihan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda pula. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyestone, bahwa kebijakan publik didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya (1971 : 18).

W.I. Jenkins (1978 : 15) seperti dikutip Solichin Abdul Wahab (2001 : 4-5) mendefinisikan kebijakan publik :

“a set of interrelated decisions taken by a political actor or a group of actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power these actors to achieve” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Sedangkan Udoji (dalam Abdul wahab, 2001 : 4-5) mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai *an sanctioned course of action to particular problem or group of related problems that affect society at large* (suatu tindakan bersanksi yang

mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat).

Dua pandangan kebijakan publik sebagaimana dikemukakan Abdul Wahab (1990 : 30-31), mengandung pengertian 2 makna yaitu :

- a. Pertama, pendapat para ahli yang mengidentikkan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Para ahli yang berpendapat demikian cenderung beranggapan semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya adalah kebijakan publik.
- b. Kedua, pendapat para ahli yang memusatkan perhatian pada implementasi kebijakan. Para ahli yang berpendapat demikian dapat dibagi dalam dua kutub yaitu mereka yang melihat kebijakan publik sebagai suatu keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu dan mereka yang beranggapan bahwa kebijakan publik mempunyai akibat atau dampak yang dapat diramalkan atau dapat diantisipasi sebelumnya.

M. Irfan Islamy mengemukakan beberapa definisi kebijaksanaan negara yang mempunyai beberapa persamaan sebagaimana disampaikan oleh Thomas R. Dye yang mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai "*is whatever governments choose to do or not to do*" (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dye mengatakan, jika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, harus ada tujuannya, dan kebijaksanaan negara harus meliputi semua "tindakan" pemerintah sehingga bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Parker mendefinisikan kebijakan sebagai

suatu tujuan tertentu atau serangkaian asas tertentu atau tindakan yang dihasilkan oleh pemerintah pada waktu tertentu dalam kaitan dengan subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang kritis. Nakamura Smallwood (Bambang Sunggono, 1994 : 23-24) mempunyai pandangan kebijakan publik sebagai semua pilihan atau tindakan, dan melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan kebijakan, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Pelaksanaan kebijakan
3. Penilaian kebijakan atau evaluasi kebijakan

Dari pandangan Dye, Parker dan Nakamura Smallwood dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah untuk melakukan suatu kegiatan yang dimulai dari perumusan, pelaksanaan dan penilaian atau evaluasi kebijakan. Selanjutnya beberapa konsep dasar dalam studi kebijakan publik menjadi masukan yang cukup beralasan bagi perkembangan studi pemerintahan di Indonesia. Konsep ini memang lebih spesifik dibandingkan dengan konsep/ pengertian yang diberikan oleh Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa kebijakan publik itu adalah baik yang tidak dilakukan ataupun yang dilakukan oleh pemerintah. Lain halnya dengan pendapat ES. Quade (1985 : 5), yang berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan study yang bersifat terapan dan mencakup berbagai analisis dalam kerangka organisasi publik.

Lebih lanjut Quade menyatakan bahwa :

Policy analysis is a form of applied research carried out to acquire a deeper understanding of socio-technical issues and to bring about better solution. Attempting to bring modern science and technology to bear on society's problems, policy analysis searches for feasible courses of actions, generating information and marshaling evidence of the benefits and other consequences that would follow their adoption and implementation, in order to help the policy makers choose the most advantageous action. Operations research,

systems analysis, cost-benefit analysis and cost effectiveness analysis are in the same category and often employed in policy analysis studies. In policy analysis, the word 'analysis' implies the use of intuition, judgment and encompasses not only the examination of policy by decomposition into its components but also the design and synthesis of the new alternatives.

(Analisis kebijakan adalah sebuah bentuk dari riset terapan yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih mendalam akan isu-isu sosial-teknis dan untuk menghasilkan pemecahan yang lebih baik. Berusaha untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern pada masalah-masalah sosial, analisis kebijakan mencari serangkaian tindakan yang bisa dilakukan, menghasilkan informasi dan menyusun bukti tentang manfaat-manfaat dan konsekuensi-konsekuensi lain yang akan menyusul adopsi dan implementasi mereka, untuk membantu para pembuat kebijakan memilih tindakan yang paling menguntungkan. Riset operasi, analisis sistem-sistem, analisis biaya-manfaat dan analisis efektivitas biaya berada dalam kategori yang sama dan sering kali digunakan di dalam studi-studi analisis kebijakan. Di dalam analisis kebijakan, kata 'analisis' menyiratkan penggunaan intuisi, penilaian dan tidak hanya mencakup pengujian atas kebijakan melalui penguraian ke dalam komponen-komponennya tetapi juga desain dan sintesis dari alternatif-alternatif baru).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli kebijakan antara lain Thomas R, Parker, Nakamura, Howlatt & Rames, dan Quade dapat dikatakan kebijakan Pemerintah Kota Semarang tentang kebersihan atau penanganan sampah yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, merupakan kebijakan publik. Kebijakan tersebut telah diputuskan melalui proses politik dan administrasi yang penetapannya disetujui oleh DPRD. Oleh karena itu, dengan ditetapkan Perda tersebut diharapkan dapat dipenuhi tuntutan publik guna menciptakan kondisi kota yang bersih, sehat dan nyaman.

Kebijakan penanganan sampah agar dapat mencapai sasaran dan tujuan secara efektif, diperlukan pengaturan manajerial yang jelas, antara lain meliputi perumusan langkah-langkah penanganan sampah, pelaksanaan, evaluasi maupun pengendalian

dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan Kota Semarang selaku organisasi publik benar-benar dituntut kinerjanya agar pelayanan kebersihan yang diberikan oleh publik dapat terlaksana sesuai dengan tujuan secara efektif.

2. Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi menurut Martin. H. Manser (1995 : 208) adalah *to implement* (mengimplementasikan), berarti *to provide the means for carrying out (a plan, idea etc)* dan (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). Implementasi kebijakan dapat dipandang suatu proses melaksanakan kebijaksanaan yang biasanya berbentuk Undang-undang atau peraturan pemerintah.

Jadi implementasi dapat diartikan pelaksanaan atau melaksanakan seperti pendapat Udoji (1981) dalam Abdul Wahab (2001 : 59) "*the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams of blue prints file jackets unless they are implemented*". (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Sedangkan Daniel A. Mazmanian et al (1979) seperti yang dikutip Sholichin Abdul Wahab (2001: 65) menjelaskan makna implementasi ini dengan menyatakan bahwa :

Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup

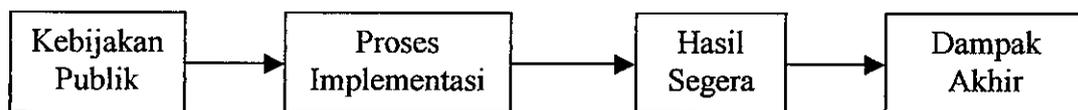
baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijaksanaan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran tetapi menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat. Mazmanian mengemukakan bahwa perumusan kebijaksanaan dan implementasi kebijaksanaan tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang terpisah.

Implementasi kebijakan publik menurut Dunn (1992 : 80) adalah sebagai pelaksanaan-pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan sampai dicapainya hasil kebijakan. Jadi yang dimaksud implementasi adalah sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Bambang Sunggono (1994 : 139) mengatakan proses implementasi adalah suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan (*content*) yang dapat digambarkan :

Gambar II.1

Proses Implementasi Kebijakan



Namun menurut Quade (1984 : 310) proses implementasi kebijakan yang ideal terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasian, kelompok sasaran dan faktor-faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya suasana yang

agak memanas (*tension*) dan kemudian diikuti tindakan tawar menawar atau transaksi tersebut dapat digunakan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

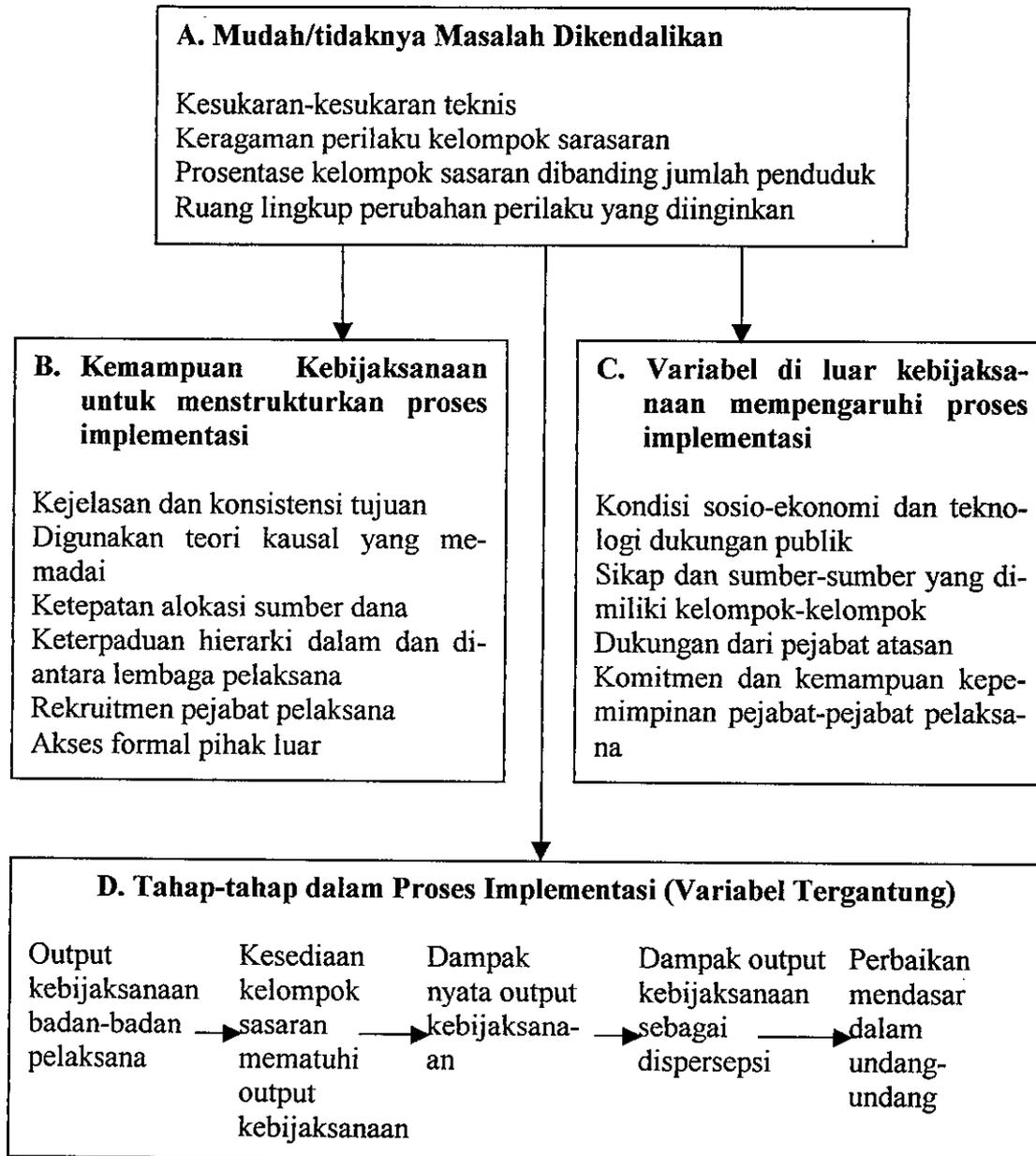
Agar tercapai tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi perlu diidentifikasi variabel-variabel seperti yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip Sholichin Abdul Wahab (2001 : 81).

Variabel-variabel yang dimaksudkan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori besar yaitu :

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan;
2. Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; dan
3. Pengaruh langsung pelbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut.

Gambar II. 2

Variabel-variabel Implementasi Kebijakan
Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier



Sumber : Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, 2001, halaman 82

Berdasarkan pemikiran yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabitier dapat dikatakan bahwa salah satu variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan antara lain adalah dukungan publik dan sikap dan sumber-sumber yang dimiliki oleh kelompok-kelompok masyarakat. Perhatian publik pada kebanyakan isu kebijaksanaan cenderung mengikuti suatu siklus yang pada suatu saat mula-mula perhatian dan dukungan publik terhadap suatu masalah begitu menggebu-gebu, kemudian tiba-tiba dukungan yang luas itu merosot sangat tajam. Ini disebabkan masyarakat menyadari tingginya biaya operasional untuk mengatasi masalah tersebut atau pelayanan yang diberikan pengambil kebijakan dirasakan kurang memuaskan bagi kelompok sasaran.

Perhatian dan keprihatinan seperti itu akan menyusut secara tajam kalau ongkos dari program tersebut dibebankan pada lapisan masyarakat tertentu sehingga mereka menarik dukungan semula. Makin gencarnya penentang-penentang program, dan masyarakat sendiri maupun media masa mengalihkan perhatiannya pada isu-isu lain yang dianggap lebih penting. Tugas penting dan amat problematik yang dihadapi oleh para pendukung suatu program adalah menjabarkan dukungan yang tadinya meluas dari suatu rancangan program menjadi suatu program yang melembaga (sebut saja misalnya Peraturan Daerah tentang penanganan sampah/kebersihan) bisa diterima sebagai partisipan-partisipan yang syah dan menentukan dalam keputusan kebijaksanaan. Oleh karena itu implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang salah satu variabel yang mempengaruhi antara lain dukungan publik sebagai partisipan dalam pelaksanaan program penanganan sampah/kebersihan, atau oleh penulis secara spesifik disebut sebagai bentuk partisipasi.

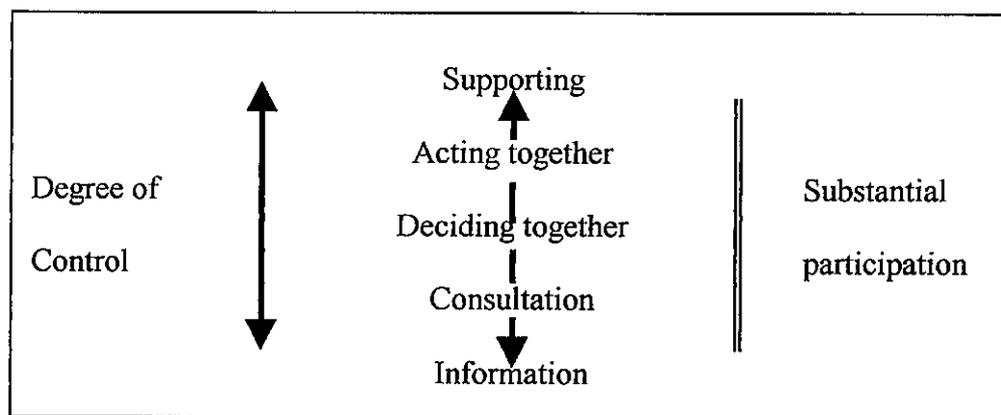
Pandangan tersebut juga senada dengan pendapat yang ditulis oleh David Wilcox (1994 : 1), bahwa tingkat partisipasi dapat diketahui sebagai berikut :

“The guide proposes a five-rung ladder of participation which relates to the stance an organisation promoting participation may take.

1. Information: merely telling people what is planned.
2. Consultation: offering some options, listening to feedback, but not allowing new ideas.
3. Deciding together: encouraging additional options and ideas, and providing opportunities for joint decision-making.
4. Acting together: not only do different interests decide together on what is best, they form a partnership to carry it out.
5. Supporting independent community interest: local groups or organisations are offered funds, advice or other support to develop their own agendas within guidelines.”

Gambar : II.3

Tingkatan Partisipasi menurut David Wilcox

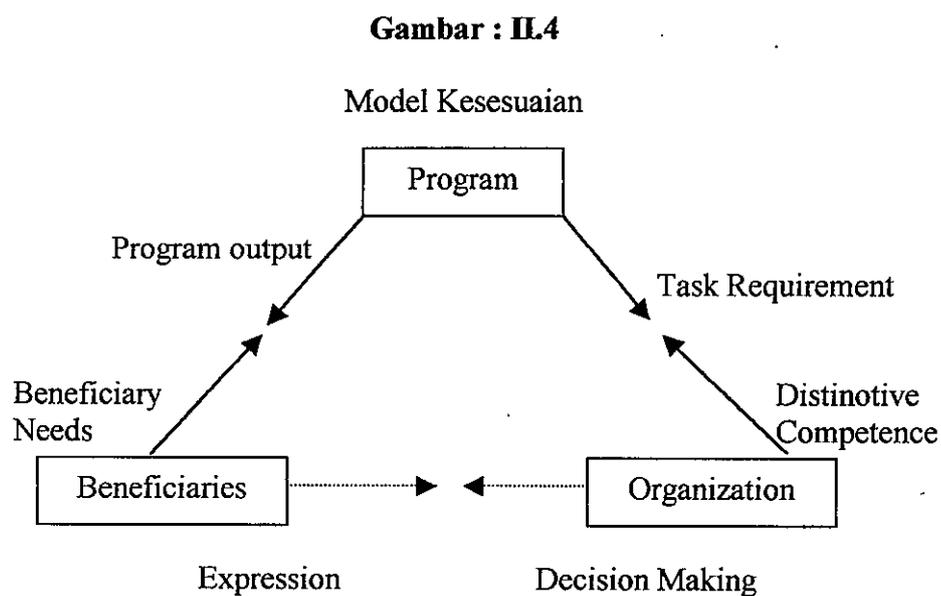


Sumber : David Wilcox (1994 : 1)

Pencapaian keberhasilan suatu program/kebijakan sangat tergantung dari para pelaku yang mempunyai peranan di dalam kebijakan. Oleh karena itu dalam menentukan keberhasilan suatu program maka model kesesuaian DC Korten merupakan bentuk yang ideal untuk mencapai keberhasilan suatu program.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa konsep model kesesuaian yang dikembangkan oleh David C. Korten tentang : *"Three Way Fit"* atau kesesuaian Tiga Arah, merupakan bentuk yang ideal dan dapat memberi kerangka pada penelitian kebijakan persampahan.

Skematis teori David C. Korten tersebut di atas dapat dilukiskan dalam diagram sebagai berikut :



Sumber : Moeljarto (1996 : 136)

Di dalam diagram terlihat bahwa organisasi sebagai fokus penelitian harus mempunyai kemampuan menyediakan mekanisme untuk mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan obyektif masyarakat menjadi keputusan organisasi, melengkapi organisasi dengan pelbagai sumber dan memobilisasikannya untuk dapat memenuhi tuntutan pelaksanaan program sedemikian rupa sehingga output program tadi akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, (Moeljarto, 1996: 136-137).

Mengacu teori David C. Korten di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan persampahan di Kota Semarang akan dapat diimplementasikan dengan baik manakala

program tersebut dirasakan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam implementasi kebijakan persampahan tersebut masyarakat akan selalu bersedia dan merespon positif dengan memberikan dukungan berupa sumber-sumber yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memobilisasikan agar pelaksanaan kebijakan persampahan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi juga sebaliknya manakala program atau kebijakan persampahan tersebut tidak akan memberikan dampak positif dan nilai manfaat bagi masyarakat, maka mereka tidak akan bersedia mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, terlebih dalam bentuk partisipasi.

Meter dan Horn (1975) dalam Samodra Wibawa (1994 : 19) merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung dalam antar hubungan berbagai faktor yang mempengaruhi, antara lain :

1. Standar dan sasaran kebijakan.
2. Sumber daya
3. Komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas
4. Ciri-ciri sifat Badan/Instansi pelaksana
5. Sikap para pelaksana
6. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi menurut Grindle (1980) menyebutkan:

Pertama, isi kebijaksanaan (*policy contents*) yang meliputi: (1) kepentingan yang terpengaruh kebijakan; (2) jenis manfaat yang dihasilkan; (3) derajat

perubahan yang diinginkan; (4) siapa pelaksana program dan; (5) sumber daya. Kedua, konteks kebijakan (*policy contents*) yang mencakup: (1) kewenangan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; (2) karakteristik lembaga dan penguasa; serta (3) kepatuhan dan tanggap pelaksana.

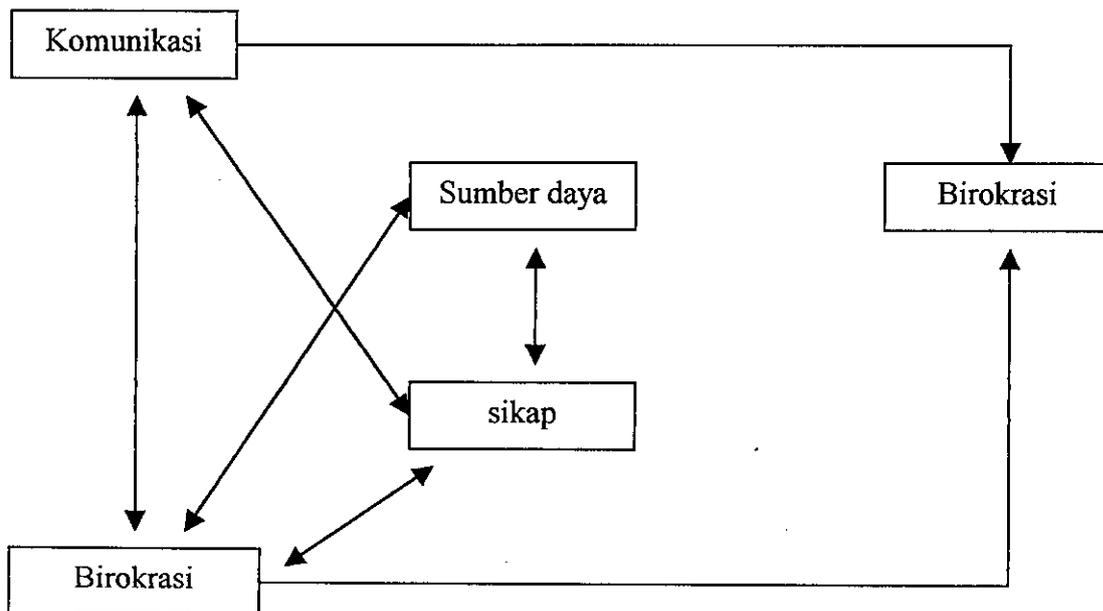
Akan tetapi variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan ada

empat yang sangat berpengaruh, seperti disebutkan Edward III (1980 : 9-10) : “(1) komunikasi (*communicati-on*); (2) sumber daya (*resources*); (3) disposisi atau sikap (*disposition or attitude*); (4) struktur birokrasi (*bureaucracy structure*)”.

Keempat variabel tersebut dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar II.5

Variabel Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III



Dari gambar tersebut di atas dapat diuraikan lebih lanjut bahwa ruang lingkup keempat variabel meliputi :

- a). Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijakan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat bawah.

- b). Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang terjalin di antara bagian-bagian tersebut.
- c). Variabel sumber daya mencakup manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan.
- d). Variabel sikap atau disposisi aparat pelaksana, bisa berupa sikap positif dalam bentuk memberikan dukungan atau sikap negatif dalam bentuk apatis.

Dalam pelaksanaannya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pelaksanaan kebijakan negara tersebut menjadi sempurna. Syarat-syarat tersebut menurut Hogwood et al (dikutip dari Abdul Wahab, 1997 : 64) sebagai berikut :

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.
2. Untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan kausalitas yang bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung.
6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan dalam urutan yang tepat.
8. Tugas-tugas diperinci lalu ditempatkan dalam urutan yang tepat.
9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Pihak-pihak yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melakukan studi implementasi suatu kebijakan publik, secara umum dihadapkan pada tiga aspek. Yang pertama, perumusan kebijakan, ketika peneliti berusaha mencari bagaimana kebijakan itu dirumuskan. Kedua, aspek implementasi kebijakan, dalam hal ini peneliti akan berupaya untuk menemukan jawaban bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik faktor yang

mendukung maupun faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Yang ketiga, aspek dampak, yaitu peneliti berusaha mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kebijakan pemerintah, baik dampak positif yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan seperti pendapat Anderson (dikutip dari Irfan Islami, 1986 : 108) antara lain :

a. Faktor pendorong untuk melaksanakan kebijakan

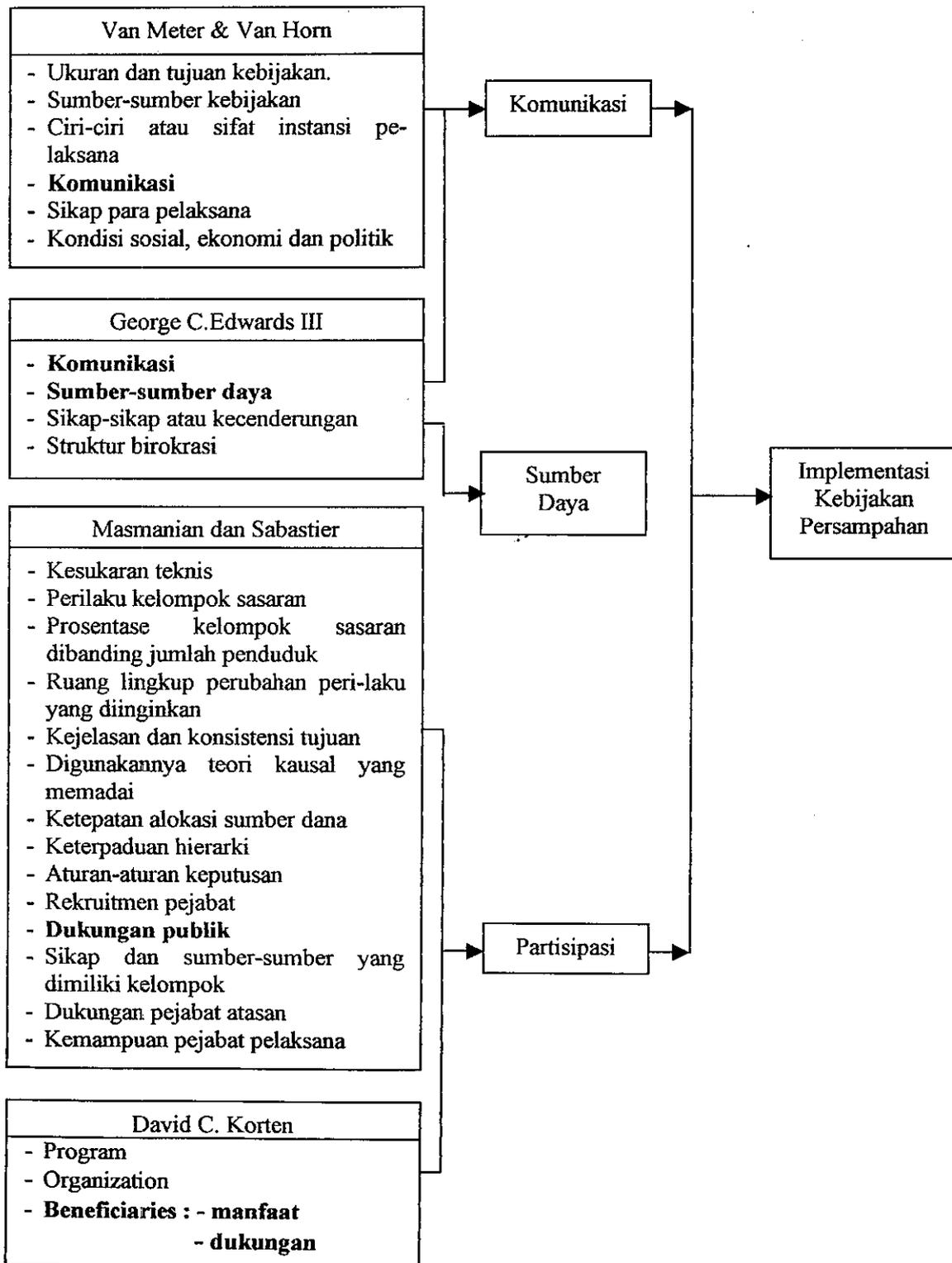
1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas kebijakan badan atau lembaga pemerintah.
2. Terdapat kesadaran masyarakat untuk menerima kebijakan.
3. Keyakinan bahwa kebijakan dibuat secara konstitusional.
4. Adanya kepentingan pribadi
5. Adanya sanksi hukum bagi yang tidak melaksanakan.
6. Masalah waktu

b. Faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan.

1. Kebijakan bertentangan dengan sistem nilai-nilai masyarakat.
2. Keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat
3. Adanya ketidakpastian hukum

Berdasarkan beberapa konsep teori implementasi kebijakan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam penelitian implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang banyak dipengaruhi oleh beberapa variabel kebijakan antara lain komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan dukungan publik atau sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok sasaran atau dikenal partisipasi.

Gambar II. 6
Skema teori variabel-variabel yang mempengaruhi
Implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang



2.1 Komunikasi (X1)

Komunikasi berperan dan berpengaruh terhadap kegiatan organisasi, karena tanpa komunikasi yang efektif pencapaian tujuan organisasi akan rendah. Pada dasarnya komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Komunikasi, seperti pendapat Ruben (1988), memberikan definisi sebagai berikut : “Komunikasi manusia adalah suatu proses melalui mana individu dalam hubungannya, dalam kelompok, dalam organisasi dan dalam masyarakat menciptakan, mengirimkan, dan menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi yang efektif menurut Moekijat (1990 : 80) adalah : (a) Kemampuan orang untuk menyampaikan informasi; (b) Pemilihan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh komunikator; (c) Saluran komunikasi yang jelas dan langsung; (d) Media yang memadai untuk menyampaikan pesan; (e) Penentuan waktu dan penggunaan media yang tepat; (f) Tempat-tempat penyebaran yang memadai apabila diperlukan untuk memudahkan penyampaian pesan yang asli, tidak dikurangi, tidak diubah, dan dalam arah yang tepat.

Proses komunikasi yang terikat dalam struktur formal tersebut, pada hakikatnya dapat dibedakan dalam tiga dimensi (Miftah Thoha, 1983 : 184) :

- a. Dimensi vertikal, yaitu dimensi komunikasi yang mengalir dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke atas.
- b. Dimensi horisontal, yaitu pengiriman dan penerimaan berita atau informasi yang dilakukan antara berbagai pejabat yang mempunyai kedudukan yang sama.

- c. Dimensi luar organisasi yaitu dimensi komunikasi yang timbul sebagai akibat pernyataan bahwa suatu organisasi tidak dapat hidup sendirian tetapi merupakan bagian dari lingkungan.

Edwards III (1980 : 25) menjelaskan, persyaratan utama bagi implementasi yang efektif adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, keputusan kebijakan harus disalurkan (*transmission*) kepada orang-orang yang tepat, sehingga komunikasi harus akurat diterima oleh para pelaksana; kemudian jika kebijakan akan diterapkan, maka pemerintah kebijakan harus diterima dengan jelas (*clarity*) selain itu perintah penetapan harus konsisten (*consistency*).

Dikaitkan dengan implementasi kebijakan kebersihan kota, proses komunikasi bergantung instansi terkait melaksanakan kebijakan pimpinan atau instansi di atasnya, sehingga diharapkan implementasi dapat terlaksana dengan baik.

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Akan tetapi, banyak hambatan-

hambatan yang menghadang transmisi komunikasi-komunikasi pelaksanaan dan hambatan-hambatan ini mungkin menghalangi pelaksanaan kebijakan.

Jika kebijakan-kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu harus jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para pelaksana (*impkmentors*) akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan. Selain itu, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan, pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan mereka atau pandangan-pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.

Aspek lain dari komunikasi menyangkut petunjuk-petunjuk pelaksanaan adalah persoalan konsistensi. Keputusan-keputusan yang bertentangan akan membingungkan dan menghalangi staf administratif dan menghambat kemampuan mereka untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan secara efektif. Sementara itu, ada banyak hal yang mendorong terjadinya komunikasi yang tidak konsisten dan menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan. Beberapa hal yang dimaksud menyangkut transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

Transmisi. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana tampaknya. Banyak sekali ditemukan

keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan-keputusan yang dikeluarkan.

Ada beberapa hambatan yang timbul dalam mentransmisikan perintah-perintah implementasi. *Pertama*, pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan. Pertentangan terhadap kebijakan-kebijakan ini akan menimbulkan hambatan-hambatan atau distorsi seketika terhadap komunikasi kebijakan. Hal ini terjadi karena para pelaksana menggunakan keeluasaan yang tidak dapat mereka elakkan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dan perintah-perintah umum, *Kedua*, informasi melewati berlapis-lapis hierarkhi birokrasi.

Seperti kita ketahui birokrasi mempunyai struktur yang ketat dan cenderung sangat hierarkhis. Kondisi ini sangat mempengaruhi tingkat efektivitas komunikasi kebijakan yang dijalankan. Penggunaan sarana komunikasi yang tidak langsung dan tidak adanya saluran-saluran komunikasi yang ditentukan mungkin juga mendistorsikan perintah-perintah pelaksana. *Ketiga*, pada akhirnya penangkapan komunikasi-komunikasi mungkin dihambat oleh persepsi yang selektif dan ketidakmauan para pelaksana untuk mengetahui persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. Kadang-kadang para pelaksananya mengabaikan apa yang sudah jelas dan mencoba menduga-duga makna komunikasi-komunikasi yang "sebenarnya".

Kejelasan. Faktor kedua yang dikemukakan Edwards III adalah kejelasan. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali

instruksi-instruksi yang direruskan kepada pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal.

Namun demikian, ketidakjelasan pesan komunikasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Sesuatu yang sering dihambat oleh instruksi-instruksi yang sangat spesifik menyangkut implementasi kebijakan. Edwards mengidentifikasi enam faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembuatan kebijakan pengadilan.

Konsistensi. Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan, maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Di sisi yang lain pun secara umum lebih mudah menghilangkan perilaku tertentu, tetapi kebanyakan implementasi membutuhkan tindakan-tindakan yang kompleks dan positif.

Faktor-faktor lain yang menghalangi pejabat-pejabat atasan dalam mengirimkan komunikasi-komunikasi implementasi yang jelas adalah usaha para pejabat ini untuk menghindari kelompok-kelompok yang menentang dalam masyarakat. Lebih umum, beberapa pejabat khususnya para legislator mungkin ingin menghindari pertanggungjawaban keputusan-keputusan mereka. Dengan demikian, mereka ingin membuat kebijakan-kebijakan yang kabur dan menyerahkan kepada pejabat-pejabat dalam cabang-cabang lain untuk menerapkan suatu peraturan atau undang-undang. Kurangnya pengetahuan profesional atau pemahaman tentang suatu bidang kebijakan diantara pejabat-pejabat tinggi mungkin akan membatasi kejelasan petunjuk-petunjuk yang mereka keluarkan.

Pada akhirnya, faktor yang menjadi penyebab utama keputusan-keputusan kebijakan yang kabur adalah kurangnya konsensus yang sering terjadi mengenai tujuan-tujuan kebijakan. Para pembuat keputusan seringkali tidak mencoba menyebarkan tujuan-tujuan. Tujuan-tujuan khusus membuat mereka menghadapi kesulitan untuk membantu koalisi-koalisi yang mendukung di antara kepentingan-kepentingan yang berbeda. Lebih dari itu, bila keputusan-keputusan membutuhkan kesepakatan dari beberapa orang yang mempunyai kedudukan atau pengaruh yang sama, seperti dalam lembaga-lembaga legislatif dan pengadilan-pengadilan yang berwenang untuk meninjau kembali keputusan hakim, kebijakan lebih cenderung kabur karena seringkali membutuhkan kompromi yang besar mengenai hal-hal yang khusus agar dapat mencapai suatu keputusan yang berhubungan, tetapi secara konseptual berbeda, dari kejelasan komunikasi-komunikasi adalah konsistensi. Bila para pelaksana perintah-perintah tidak

konsisten, mereka pasti tidak mampu dalam menghadapi semua tuntutan yang dibuat mereka. Mereka mungkin secara efektif lumpuh, atau mereka memilih antara petunjuk-petunjuk atas dasar apa yang mereka pilih.

Penjelasan mengenai bagaimana komunikasi implementasi yang tidak konsisten sama seperti penjelasan bagi kurangnya kejelasan pesan komunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsistensi keputusan menyangkut: kerumitan kebijakan publik, masalah-masalah yang mengawali program-program baru dan akibat banyaknya ketidakjelasan tujuan. Ketidakkonsistenan seperti, halnya kekaburan berasal dari semakin besarnya kepentingan yang bersaing yang berusaha untuk mempengaruhi implementasi kebijakan. Keadaan ini akan mendorong kemungkinan perintah-perintah implementasi yang tidak konsisten. Akhirnya, semakin besar perhatian para pembuat keputusan terhadap preseden yang menjungkirbalikkan, maka semakin tinggi probabilitas keputusan-keputusan mereka yang nampak tidak konsisten.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka indikator yang digunakan untuk variabel komunikasi adalah :

- a. tingkat kejelasan informasi
- b. tingkat konsistensi informasi

2.2 Sumber Daya (X2)

Dalam implementasi kebijakan persampahan, sumber daya merupakan faktor utama dalam keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu diperlukan kemampuan sumber daya yang handal dalam pelaksanaan penanganan sampah, tidak hanya pada sumber daya manusia saja, namun juga sumber daya lainnya

misalnya finansial, fisik (materiil, mesin, kemampuan teknologi dan lain-lainnya). Di antara sumber daya tersebut, sumber daya manusia merupakan faktor yang penting dalam suatu organisasi karena mereka merupakan faktor penggerak roda organisasi. Untuk itu, diperlukan kemampuan yang memadai terutama bagi pelaksanaan kebijakan persampahan. Dalam sebuah organisasi yang modern, terlebih bagi organisasi publik, dituntut adanya aparatur pelaksana yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini mendorong tercapainya tujuan dengan lebih cepat, efektif dan efisien.

Dari pengertian tersebut di atas ada tiga hal penting yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia, yaitu kecakapan, fisik dan mental. Ketiganya harus diperankan secara terpadu. Kemampuan aparatur pelaksana, menurut Miftah Thoha (1993 : 154), diidentifikasi sebagai berikut : “Kemampuan adalah suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan pula dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan, dan pengetahuan”.

Fungsi sumber daya manusia, menurut Bambang Tri Cahyono (1996), terbagi atas fungsi manajemen, yang meliputi *planning, organizing, actuating, controlling*. Fungsi kedua adalah fungsi operasional, yang meliputi *procedurement, development, kompensasi, integrasi, maintenance dan separation*.

Menurut Flipo (1999 : 5) fungsi-fungsi manajemen sumber daya adalah :

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Pengarahan (*directing*)

4. Pengendalian (controlling)
5. Pengembangan (developing)
6. Pemberian kompensasi
7. Pengintegrasian
8. Pemeliharaan (maintenance)

Dari pandangan kedua ahli tersebut yaitu Bambang Tri Cahyono dan Flippo, fungsi sumber daya manusia pada hakikatnya adalah merupakan fungsi manajemen untuk menggerakkan suatu tujuan organisasi atau kebijakan. Senada dengan pandangan kedua ahli tersebut, dalam kebijakan persampahan di Kota Semarang, sumber daya manusia dipandang mempunyai peran menentukan dalam manajemen operasional pelaksanaannya.

Menurut Henry Sinamora (1993 : 3) manajemen sumber daya manusia adalah :

Pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen sumber daya manusia yang efektif mengharuskan manajemen menemukan cara terbaik dalam mengkaryakan orang-orang agar mencapai tujuan perusahaan dan meningkatkan kinerja organisasi. Lebih lanjut dijelaskan ada 4 tipe sumber daya yaitu : (1) Finansial, (2) Fisik, (3) Manusia dan (4) Kemampuan teknologi dan sistem.

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Secara umum sumber daya yang terdapat dalam organisasi dapat dikelompokkan atas dua macam yakni : (1) sumber daya manusia (human resources) dan (2) sumber daya non manusia (non human resources). Yang termasuk dalam

kelompok sumber daya non manusia antara lain modal, mesin, teknologi, bahan-bahan (material), peralatan dan lain-lain.

Gibson (1990 : 21) mengemukakan bahwa kemampuan unsur pelaksana untuk dapat mencapai hasil secara efisien dan efektif adalah :

1. Kemampuan interaksi
2. Kemampuan konseptual
3. Kemampuan administrasi

Berdasarkan pandangan dan pendapat beberapa ahli di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud sumber daya dalam penelitian ini adalah semua potensi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Kebersihan, untuk mengimplementasikan kebijakan penanganan sampah. Adapun sumber daya tersebut meliputi antara lain: sumber daya manusia (Aparat Dinas Kebersihan), peralatan teknis, sarana dan prasarana termasuk ketrampilan/ penggunaan teknologi.

2.3 Partisipasi (X3)

Ada beberapa pendapat para pakar tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mubyarto (1984 : 35) mendefinisikan sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya suatu program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Nelson (Bryant dan White, 1982 : 206) menyebut dua macam partisipasi : partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horizontal, dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, antara klien dengan

patron, atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah, yang diberi nama dengan partisipasi vertikal. Keterlibatan kelompok atau masyarakat sebagai suatu kesatuan, dapat disebut partisipasi kolektif, sedangkan keterlibatan individual dalam kegiatan kelompok dapat disebut partisipasi individual (Davis dalam Huneryager dan Heckmann, 1967 : 617).

Partisipasi penanganan sampah atau pengelolaan kebersihan, sebagaimana yang dimaksud dalam tulisan ini ialah partisipasi vertikal dan horisontal. Masyarakat disebut partisipasi vertikal, karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain (Dawam Rahardjo, sebagaimana dikutip Taliziduhu Ndraha 1986 : 4.26). Dalam hal lain masyarakat berada posisi sebagai bawahan, pengikut atau klien. Disebut partisipasi horisontal, karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai suatu kemampuan untuk berprakarsa, yakni setiap anggota/ kelompok masyarakat berpartisipasi horisontal satu dengan yang lain, baik dalam melakukan kegiatan dengan pihak lain. Tentu saja partisipasi seperti ini merupakan suatu tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Untuk mengetahui keberhasilan pembangunan masyarakat pada hakikatnya diperlukan motivasi untuk menumbuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Keterlibatan masyarakat/*stakeholder* pembangunan tersebut hendaknya melibatkan semua lapisan masyarakat dari bawah sampai atas atau dikenal dengan partisipasi.

Menurut Talizidhuhu Ndraha, masyarakat bergerak untuk berpartisipasi jika :

- a. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang mudah dilihat/sudah dikenal di tengah masyarakat yang bersangkutan.
- b. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan.
- c. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan yang bersangkutan.
- d. Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat berkurang jika mereka tidak atau berperan dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya mencakup pengertian luas tetapi yang jelas merupakan kebersihan dari sistem demokrasi guna mengikutsertakan masyarakat dalam setiap perencanaan kebersihan pembangunan, kebersihan seperti misalnya dalam rapat koordinasi di tingkat kelurahan. Seperti halnya dikatakan oleh Prof. Mubyarto (1984: 36)

Dalam keadaan policy ideal, keikutsertaan masyarakat untuk membuat (putusan-putusan) politik yang bersangkutan dengan nasib mereka (lapangan kerja atau pendapatan), adalah merupakan ukuran tingkat partisipasi masyarakat untuk menentukan nasib sendiri semakin besar partisipasi dalam pembangunan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peranan partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama demi kelangsungan dan kebersihan kota didasarkan atas kerelaan dan kemauan untuk mengambil keputusan secara aktif.

Lebih lanjut Winardi, S.E (1981 : 64) mengatakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti program K-3 atau kebersihan meliputi beberapa hal antara lain:

1. Partisipasi dalam memberikan dan menerima informasi.
2. Partisipasi dalam memberikan tanggapan dan saran terhadap informasi yang diterima, baik yang dimaksudkan untuk menolak atau menerima informasi.

Pendapat di atas didukung dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Keith Davis dalam bukunya *Leadership and Development* diterjemahkan oleh Koentjaraningrat (1983 : 21) adalah sebagai berikut : “Partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dari orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan sumbangan pada tujuan kelompok dan ikut serta bertanggung jawab untuk mereka.”

Partisipasi yang terpenting adalah tahapan penerimaan masyarakat, baik secara mental maupun emosional, dalam situasi keberhasilan serta bertanggung jawab atas tanggapan ataupun penolakan terhadap program penanganan sampah/ kebersihan kota. Dengan demikian suksesnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah/kebersihan pada dasarnya tergantung dari beberapa persyaratan maupun situasi tertentu. Hal ini dipertegas dengan pendapat Evelyn Wood, dalam *Kurukshetra* (1962 : 32) sebagaimana diterjemahkan oleh Talizidhuhu Naraha (1987 : 327). “Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.”

Di samping partisipasi dalam informasi, masyarakat hendaknya juga mampu memberikan partisipasinya dalam menilai pelaksanaan pembangunan (dalam hal ini penilaian terhadap kebersihan penanganan sampah/kebersihan). Masyarakat terlibat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan program kebersihan atau penanganan sampah sesuai dengan rencana dan sejauh mana dampak atau hasilnya dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat, baik bentuk maupun jenisnya, dalam berpartisipasi menangani permasalahan sampah/kebersihan.

Menurut Santoso S. Hamidjojo (1997 : 8), bentuk dan jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi buah pikiran, kemampuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai mufakat atas berbagai masalah melalui musyawarah untuk mengawali perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan, misalnya dalam rapat RT, RW, LKMD, dan lain-lain.
2. Partisipasi ketrampilan, kemampuan masyarakat untuk menyerahkan ketrampilan dalam memanfaatkan sumber daya alam dan nilai sosial bagi kepentingan industri, seni budaya, pariwisata, dan lain-lain dalam diri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Partisipasi tenaga, kemampuan masyarakat untuk menyumbang tenaganya, khususnya tenaga kasar yang bersifat manual bagi kegiatan proyek seperti gugur gunung, gotong royong dan sebagainya.
4. Partisipasi harta benda, kemampuan masyarakat untuk memberikan atau menyumbang harta bendanya terhadap usaha-usaha yang dirasakan masyarakat akan meringankan beban hidup bersama dan sesama, misalnya dalam membuat jalan, jembatan, dan lain-lain.
5. Partisipasi uang, kemampuan masyarakat untuk memberikan swadaya gotong royong masyarakat dalam keberhasilan proyek yang menyangkut pembangunan.

Di samping bentuk dan jenis-jenis partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagaimana tersebut di atas, masyarakat perlu dorongan-dorongan agar sasaran secara efektif dapat tercapai dalam menumbuhkan partisipasi

penanganan sampah/kebersihan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas partisipasi masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Santoso, yaitu:

Persyaratan untuk melaksanakan partisipasi yang efektif adalah :

- a. Perlu waktu untuk berpartisipasi sebelum berlangsungnya suatu kegiatan.
- b. Subyek partisipasi perlu relawan dengan kepentingan manusia atau masyarakat.
- c. Orang-orang yang berpartisipasi haruslah mempunyai kemampuan seperti halnya kecerdasan dan pengetahuan.
- d. Orang yang berpartisipasi perlu berhubungan timbal balik dengan bahasanya sendiri yang bisa dimengerti untuk dapat bertukar pikiran.
- e. Tidak ada salah satu pilihanpun yang bisa/merasa dirinya terganggu karena partisipasi.
- f. Biaya keterlibatan partisipasi tidak boleh melampaui nilai ekonomis atau sejenisnya.
- g. Partisipasi adalah memutuskan untuk melaksanakan kegiatan.

Berdasarkan pendapat di atas, partisipasi merupakan tindakan seseorang

untuk terlibat dalam suatu kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung guna tercapainya tujuan. Idealnya, partisipasi merupakan kegiatan yang bersifat sukarela, sebagai keikutsertaan emosional dan mental seseorang dalam kehidupan bersama yang dalam hal ini pencapaian tujuan.

Empat aspek penting yang dikemukakan Sondang P.Siagian bahwa partisipasi masyarakat mutlak diperlukan dalam rangka partisipasi pembangunan antara lain:

1. Terlibat dan ikut sertanya rakyat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara akan menentukan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Meningkatkan artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan yang sebaik-baiknya.

3. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
4. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipasi dalam pembangunan berencana. (dikutip dari Tjokroamidjojo, 1984 : 222).

Pokok pikiran dari Sondang P. Siagian yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan agar terjadi perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat yaitu:

- a. Kebijakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang faktual.
- b. Merupakan stimulan terhadap masyarakat yang berfungsi memberikan dorongan timbulnya jawaban yang mereka kehendaki.
- c. Dapat membangkitkan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah laku.

Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud partisipasi adalah keterlibatan dan keikutsertaan individu dan masyarakat dalam aktivitas atau kegiatan secara fisik, mental maupun emosional. Aktivitas tersebut dilakukan secara suka rela baik sendiri maupun secara bersama-sama.

B. Hipotesis

Dengan landasan teori yang telah diuraikan di muka, maka dapat dirumuskan hipotesisnya sebagai berikut :

1. Hipotesis Minor

- a. Ada hubungan positif dan signifikan antara komunikasi dengan implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang.

- b. Ada hubungan positif dan signifikan kemampuan sumber daya dengan implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang.
- c. Ada hubungan positif dan signifikan partisipasi dengan implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang.

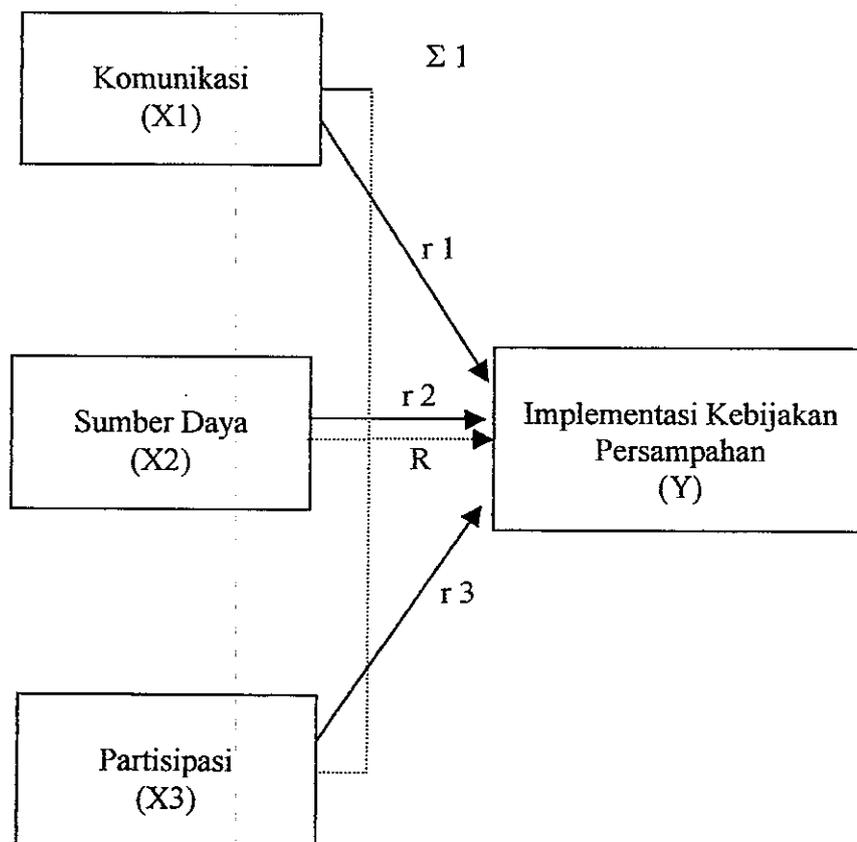
2. Hipotesis Mayor

Ada hubungan positif dan signifikan antara komunikasi, sumber daya dan partisipasi dengan implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang.

Bagan geometrical hipotesis tersebut dapat dilukiskan sebagai berikut :

Gambar II.7

Bagan Geometrical Hipotesis Penelitian



- R : Hubungan secara simultan variabel (X1, X2, X3,) terhadap variabel dependen (Y).
- $r(r_1, r_2, r_3)$: Hubungan secara parsial dari masing-masing variabel independen (X1, X2, X3) terhadap variabel dependen (Y).
- $\Sigma 1$: Faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian/Perspektif Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan analisis data dan interpretasi yang bertujuan menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti dalam rangka mengungkap fenomena sosial tertentu. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini dirancang untuk mengetahui implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang dan variabel-variabel yang mempengaruhinya yaitu: komunikasi, sumber daya dan partisipasi, baik secara sendiri-sendiri (partial) atau secara bersama-sama (simultan) terhadap implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode deskriptif analitik kuantitatif, yang akan dilengkapi dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan agar dapat dihitung dengan jumlah satuan tertentu atau dinyatakan dalam angka-angka, meliputi pengolahan data pengorganisasian data dan penemuan hasil. Metode kuantitatif dilaksanakan dengan mengkuantitatifkan data yang didapat dari responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disebar. Sedangkan pendekatan kualitatif dimaksudkan memperkaya deskripsi dan pemaknaan yang lebih mendalam dari analisa data.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Setelah memahami berbagai permasalahan penanganan sampah di Kota Semarang, maka yang menjadi ruang lingkup atau pusat perhatian dalam penelitian implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang adalah beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Tidak semua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diteliti, tetapi unsur-unsur dominan mempengaruhi menurut asumsi penulis yaitu meliputi unsur-unsur: (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, dan (3) Partisipasi, unsur-unsur inilah yang diduga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di wilayah Kota Semarang, pada wilayah-wilayah kecamatan yang telah menerima pelayanan kebersihan oleh Dinas Kebersihan Kota Semarang sebagaimana tabel :

Tabel III.1
Daftar Wilayah Kecamatan/Kelurahan
yang Memperoleh Pelayanan Kebersihan

No Urt	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Yang Memperoleh Layanan Kebersihan	
			Sudah	Belum
1	Semarang Tengah	15	15	-
2	Semarang Utara	9	8	1
3	Semarang Timur	10	10	-
4	Semarang Barat	16	16	-
5	Gayamsari	7	4	3
6	Genuk	13	7	6
7	Pedurungan	12	9	3
8	Semarang Selatan	10	10	-
9	Ngaliyan	10	6	4
10	Candisari	7	7	-
11	Gajahmungkur	8	8	-
12	Tembalang	12	9	3
13	Banyumanik	11	7	4
14	Tugu	7	3	4
15	Mijen	14	-	14
16	Gunungpati	16	-	16
Jumlah		177	119	58

Sumber: Dinas Kebersihan Kota Semarang

D. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini akan meliputi beberapa variabel. Untuk melihat pengaruh unsur-unsur implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang, yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini adalah variabel-variabel: Komunikasi (X1), Sumber Daya (X2) dan Partisipasi (X3). Di mana X1, X2 dan X3, sebagai variabel bebas (independen variabel). Variabel terikat

(dependen variabel) dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan persampahan (Y).

1. Definisi Konseptual

Untuk mencegah keaburan pengertian dari masing-masing variabel dalam hipotesis, maka dalam penulisan penelitian ini akan dikemukakan definisi konsep dari masing-masing variabel tersebut yaitu :

a) Implementasi Kebijakan Persampahan

Suatu cara atau proses untuk pencapaian tujuan ditetapkannya suatu kebijakan, dan kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan tentang penanganan sampah/persampahan di Kota Semarang.

b) Komunikasi

Adalah penyampaian informasi atau buah pikiran kepada orang lain agar dapat paham dan mengerti maksud dan tujuan dari informasi tersebut. Dalam hal ini adalah hubungan dua orang atau lebih yang dilakukan oleh organisasi pelaksana kebijakan dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan, dengan mendapatkan umpan balik.

c) Sumber Daya

Adalah segenap sumber yang dimiliki oleh pemrakarsa kebijakan, baik sumber daya manusia atau sumber-sumber yang lain, yang dapat digunakan sebagai daya dukung dalam pelaksanaan program atau kebijakan.

d) Partisipasi

Keterlibatan masyarakat atau kelompok sasaran dalam menerima dan menolak program, memberikan tanggapan atau saran, dan kemampuan dalam memberikan dukungan pemikiran, tenaga, dana atau swadaya gotong royong masyarakat dalam keberhasilan program atau kebijakan.

2. Definisi Operasional.

Dari definisi konsep masing-masing variabel yang telah dikemukakan di atas, agar memudahkan pengukuran variabel maka definisi konsep diturunkan ke dalam operasional berupa indikator dan dimensi pengukurannya yaitu sebagai berikut :

- a) Implementasi kebijakan persampahan akan diukur dengan indikator :
 - 1) Tingkat pemahaman terhadap isi kebijakan
 - (a) Tingkat pemahaman aparaturnya mengenai tujuan kebijakan persampahan.
 - (b) Tingkat pemahaman masyarakat terhadap tujuan kebijakan persampahan.
 - (c) Tingkat pemahaman aparaturnya mengenai manfaat kebijakan.
 - (d) Tingkat kemampuan aparaturnya dalam menterjemahkan isi kebijakan.
 - 2) Produktivitas
 - (a) Frekuensi pengambilan sampah.
 - (b) Ada tidaknya sampah yang menumpuk dan tidak tertangani.

(c) Besarnya pembayaran retribusi sampah.

(d) Frekuensi penerapan sanksi pelanggaran perda.

b. Variabel komunikasi akan diukur dengan indikator :

- 1) Tingkat penyampaian informasi aparatur kepada masyarakat.
- 2) Tingkat kejelasan pesan/content yang disampaikan.
- 3) Tingkat konsistensi informasi yang disampaikan.
- 4) Banyaknya media yang digunakan sosialisasi kebijakan persampahan.
- 5) Tingkat pemahaman masyarakat atas informasi kebijakan persampahan.
- 6) Tingkat umpan balik yang disampaikan masyarakat kepada implementor kebijakan.
- 7) Tingkat kerja sama dan koordinasi lembaga implementor.

c. Variabel sumber daya akan diukur dengan indikator sebagai berikut :

- 1) Tingkat pendidikan formal yang dimiliki aparatur.
- 2) Tingkat manfaat pendidikan formal dalam tugas.
- 3) Tingkat pengetahuan terhadap pentingnya kebijakan persampahan.
- 4) Tingkat pemahaman tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan
- 5) Jumlah sarana dan prasarana penunjang.
- 6) Besarnya biaya operasional
- 7) Tingkat ketersediaan fasilitas umum kebersihan.
- 8) Jumlah kelompok swadaya masyarakat (KSM)

d. Variabel partisipasi akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- 1) Tingkat intensitas kritis dan saran yang disampaikan.
- 2) Frekuensi musyawarah/rapat penyusunan program.
- 3) Tingkat kemampuan dalam penyediaan tong sampah.
- 4) Besarnya dukungan dana/iuran.
- 5) Tingkat kemampuan dalam sumbangan material.
- 6) Intensitas gotong royong kerja bakti K-3.
- 7) Tingkat intensitas penerimaan informasi.
- 8) Tingkat efektivitas KSM dalam penanganan sampah.

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data subyek yang berupa opini dan karakteristik yang subyek penelitian mengenai hal-hal yang menyangkut implementasi kebijakan persampahan. Jenis data yang digunakan dalam rangka menguji hipotesis adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer ini diperoleh secara langsung dengan mengirimkan kuesioner/daftar pertanyaan yang merupakan persepsi, pendapat dan opini dari para pelaku/pelaksana kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang. Kuesioner/daftar pertanyaan yang

diajukan disusun berdasarkan variabel yang diteliti dengan menyediakan jawaban alternatif yang dipilih oleh responden sesuai dengan kondisi riil atas persepsi, pendapat dan opini tersebut, sehingga diharapkan didapat data yang akurat atas penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti. Data ini dapat diperoleh dari dokumen dan laporan tahunan yang diperlukan dalam penelitian ini. Data-data sekunder tersebut mempunyai relevansi terhadap penelitian implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang. Adapun data sekunder yang dijadikan acuan dalam penelitian ini antara lain Profil Dinas Kebersihan, Renstra, Lakip, dan Himpunan Peraturan tentang pengelolaan kebersihan serta data aset Dinas Kebersihan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyusun kuesioner/daftar pertanyaan yang mengacu pada variabel-variabel penelitian yang telah dijabarkan dalam definisi operasional. Instrumen penelitian adalah merupakan pengukuran terhadap fenomena sosial, oleh karena untuk mengukur fenomena tersebut peneliti akan menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian secara spesifik terhadap variabel yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini akan digunakan instrumen kuesioner dengan skala pengukuran data ordinal, yaitu memberikan nilai atau score untuk jawaban yang

diperoleh dari daftar pertanyaan paling rendah sampai pertanyaan paling tinggi. Setiap item pertanyaan pada setiap variabel menggunakan skala pengukuran antara rentang skor 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Skor ini bersifat membedakan dan mengurutkan tetapi tidak memberikan jarak yang bobotnya ditentukan berdasarkan bobot jawaban pertanyaan.

Dari masing-masing jawaban akan digunakan suatu kriteria :

1. kategori jawaban yang sangat mendukung diberikan skor 4 (empat),
2. kategori jawaban yang mendukung diberikan skor 3 (tiga),
3. kategori jawaban yang kurang mendukung diberikan skor 2 (dua),
4. kategori jawaban yang tidak mendukung diberikan skor 1 (satu).

G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Dalam suatu penelitian, populasi yang dipilih mempunyai hubungan erat dengan masalah yang diteliti. Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, 1989 : 45). Ini berarti populasi merupakan kumpulan individu atau obyek penelitian yang memiliki kualitas-kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai kelompok individu atau obyek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh implementor kebijakan kebersihan di Kota Semarang, yang terdiri dari: Kepala Dinas, Kabag TU

dan Kasubdin, Kasubbag dan Kasi, Kepala Cabang Dinas, Camat dan Lurah. Data populasi selengkapnya seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 2

**APARAT PELAKSANA KEBIJAKAN PERSAMPAHAN
DI KOTA SEMARANG YANG DIJADIKAN POPULASI DALAM
PENELITIAN**

Nomor	Nama Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Kebersihan	1
2	Ka.Subdin Dinas Kebersihan dan Ka.Bag Tata Usaha	4
3	Kepala Sub Bagian dan Kepala seksi	12
4	Kepala Cabang Dinas	2
5	Camat	16
6	Lurah	177
Jumlah		212

2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Disproportionate Random Sampling*. Menurut Sugiyono (2001: 60) teknik *disproportionate random sampling* digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata kurang proporsional. Mengingat populasi sejumlah 212 tersebut berstrata kurang proporsional maka sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

Sampel yang diambil ditentukan dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Issac & Michael (dalam Arikunto, 1998: 123):

- Lurah, sampel untuk lurah diambil sebanyak

6 lurah untuk masing-masing Kecamatan sampel : 48 +

Sehingga jumlah sampel keseluruhan : 66

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut di atas, maka dalam penelitian ini akan menggunakan sampel sebanyak 66 sampel yang dapat dianggap mewakili 212 populasi secara proporsional.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang bersifat kuantitatif dilakukan dengan jalan memberikan daftar pertanyaan/kuesioner kepada responden. Di samping itu juga dikumpulkan data kualitatif dengan cara wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) langsung dengan Kepala Dinas Kebersihan untuk memperoleh kedalaman informasi.

I. Teknik Analisis Data

1. Proses Pengelolaan Data

a. Editing

Proses tersebut merupakan langkah meneliti ulang kelengkapan dan kebenaran jawaban yang diperoleh dari responden yang didapatkan melalui pertanyaan atau kuesioner, sehingga data sesuai dengan permasalahan.

b. Coding

Proses ini merupakan kegiatan dengan pemberian tanda atau simbol dalam setiap data yang telah diteliti.

c. Tabulating

Tahap ini merupakan langkah pengelompokan data sejenis dalam frekuensi untuk mempermudah analisis.

d. Scoring

Adalah pemberian nilai atau bobot yang dilaksanakan dalam bentuk angka atas semua jawaban responden guna memperoleh data kuantitatif yang diperlukan dalam pengujian hipotesis. Untuk menentukan skor penelitian ini digunakan skala likert yakni dengan memberikan penilaian atas jawaban responden dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. sangat setuju, 2. setuju, 3. tidak setuju, 4. sangat tidak setuju. Setiap jawaban diberi skor untuk menentukan derajat favorableness. Untuk jawaban butir pertanyaan yang bersifat favorable (baik) diberi angka 4 sampai 1. Sedangkan untuk pertanyaan yang bersifat unfavorable angka skor 1 sampai 4.

2. Analisis Data.

Dalam penelitian ini adalah untuk menguji hubungan suatu pengaruh : Komunikasi (X1), Sumber Daya (X2), Partisipasi (X3), terhadap implementasi kebijakan persampahan (Y). Analisis data yang digunakan adalah analisis korelasi dan analisis logistik berganda, menggunakan program SPSS (*Statistical Program for Sosial Science*). Analisis statistik harus menggunakan data kuantitatif. Untuk mengkuantitatifkan data tersebut perlu memberikan angka-angka (skor) secara berjenjang terhadap kemungkinan jawaban responden.

Selanjutnya akan disajikan proses analisis data, adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Korelasi Rank Kendall Tau

Perhitungan korelasi sederhana menggunakan Koefisien Korelasi Rank Kendall Tau dengan rumus sebagai berikut :

$$\tau = \frac{S}{\frac{1}{2} N(N-1)}$$

Keterangan :

$\frac{1}{2} N(N-1)$: kemungkinan skor maksimum

S : skor yang sebenarnya

N : jumlah sampel

τ : koefisien korelasi kendall tau yang besarnya $(-1 < 0 < 1)$

Apabila terdapat nilai yang sama maka memakai rumus :

$$\tau = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N(N-1) - T_x} \sqrt{\frac{1}{2} N(N-1) - T_y}}$$

Keterangan :

$T_x = \frac{1}{2} \sum t(t-1)$ banyaknya angka yang sama dalam kelompok pada X

dan $T_y = \frac{1}{2} \sum t(t-1)$ = banyaknya angka sama dalam kelompok Y.

Uji Signifikansi

Untuk uji signifikansi koefisien korelasi, karena distribusi yang dipergunakan mendekati normal akan menggunakan rumus "z" sebagaimana tersebut di bawah ini :

$$Z = \frac{\tau}{\frac{\sqrt{2(2N+5)}}{9N(N-1)}}$$

Kriteria Hipotesis

Untuk menentukan H_0 dan H_a

$H_0 : \tau = 0$

Tidak terdapat hubungan antara variabel (X) dengan variabel (Y)

$H_a : \tau > 0$

Terdapat hubungan antara variabel (X) dengan variabel (Y)

Kaidah hipotesis

H_0 : ditolak apabila harga “z” hitung lebih besar daripada harga tabel “z”

H_a : diterima apabila harga “z” hitung lebih besar atau sama dengan harga tabel “z”.

b. Korelasi Berganda

Perhitungan korelasi berganda menggunakan koefisien Konkordansi

Kendall (W) dengan rumus :

$$W = \frac{s}{1/12 k^2 (n^3 - n)}$$

Apabila terdapat nilai yang sama maka r_s (korelasi ganda) memakai rumus :

$$W = \frac{s}{\{1/12 k^2 (n^3 - n)\} - k \sum \frac{T}{T}}$$

Di mana ΣT membuat kita menjumlahkan harga-harga T untuk kesemua k atau ranking data penelitian.

Keterangan :

$$s = \Sigma Ri^2 - Ri)^2/n$$

R = jumlah ranking

k = banyak variabel yang dikorelasikan

n = banyak kolom

$$T = (\Sigma t^3 - t)/12$$

Uji Signifikansi

Untuk uji signifikan Koefisien Konkordansi Kendall dilakukan dengan memasukkan harga "W" ke dalam rumus Chi Kuadrat yaitu :

$$X^2 = k (n-1) W$$

Keterangan :

X^2 = Chi Square

k = banyaknya himpunan

n = jumlah responden

W = Koefisien Konkordansi Kendall

Kaidah Hipotesis

Jika X^2 hitung $>$ X^2 tabel pada taraf signifikan 1 % dan 5 % berarti hipotesis diterima dan sebaliknya.

Selanjutnya untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel tergantung dapat diketahui dari besarnya koefisien determinasi berganda (R^2). Jika yang diperoleh dari hasil

perhitungan menunjukkan semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi variabel tergantung semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin besar untuk menerangkan variasi variabel tergantungnya. Sebaliknya jika R^2 menunjukkan semakin kecil (mendekati nol), maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variasi nilai variabel tergantung semakin kecil. Hal ini berarti model yang digunakan semakin lemah untuk menerangkan variasi variabel tergantung. Secara umum dikatakan bahwa besarnya koefisien determinasi berganda (R^2) berada antara 0 dan 1 atau $0 \leq R^2 \leq 1$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 66 responden dari implementor kebijakan kebersihan di Kota Semarang, yang terdiri dari Kepala Dinas, Kabag TU, Kasubdin, Kassubag, Kasi, Kepala Cabang Dinas, Camat dan Lurah. Untuk menunjukkan hasil penelitian maka akan dilakukan deskripsi distribusi tunggal yang meliputi data variabel implementasi kebijakan persampahan, komunikasi, partisipasi dan sumber daya. Kemudian juga di tampilkan tabel silang antara variabel independen dan variabel dependen. Penggunaan tabel tunggal dan tabel silang ini diharapkan akan dapat memberikan gambaran awal secara menyeluruh tentang hubungan antar variabel penelitian.

A.1. Implementasi Kebijakan

Pembahasan tentang implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang, sebetulnya akan sangat ditentukan oleh banyak variabel, variabel tersebut antara lain komunikasi, partisipasi, dan sumber daya. Untuk mengetahui secara detail data penelitian ini dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel IV.1
Pemahaman Terhadap Implementasi Kebijakan Persampahan

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat paham	22	33,3
Paham	19	28,8
Kurang paham	13	19,7
Tidak paham	12	18,2
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Dari hasil penelitian tingkat pemahaman implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang, yaitu para implementor memberikan jawaban yang bervariasi, dimana 22 responden (33,3%) memberikan jawaban sangat paham, 19 responden (28,8%) memberikan jawaban paham, 13 responden (19,75) memberikan jawaban kurang paham dan 12 responden (18,2%) memberikan jawaban tidak paham.

Rendahnya pemahaman aparat implementor kebijakan persampahan dikarenakan pada umumnya pejabat baru. Pada umumnya mereka kurang memperhatikan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan publik di bidang persampahan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Mardiyanto Kasubdin Perencanaan Dinas Kebersihan, mengemukakan bahwa pemahaman terhadap

implementasi kebijakan persampahan adalah sebagai berikut:

“Aparat pelaksanaan kebijakan persampahan tersebut memahami tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan uraian tugasnya. Terlebih dalam hal mendalami materi pokok peraturan-peraturan yang terkait dengan upaya-upaya meningkatkan kebersihan Kota Semarang, dan setidaknya-tidaknya memahami isi yang tersirat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang kebersihan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang. Sebagai aparat implementor bidang persampahan tentunya juga mengetahui tentang tujuan akhir upaya penanganan sampah, yang tidak lain bermuara pada terciptanya budaya bersih bagi warga Kota Semarang, dan slogan Kota Semarang sebagai Kota yang Aman Tertib Lancar Asri dan Sehat (ATLAS) bisa terwujud”.

Tabel IV.2

Pemahaman Manfaat Implementasi Kebijakan Persampahan

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat paham	14	21,2
Paham	29	43,9
Kurang paham	19	28,8
Tidak paham	4	6,1
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Tingkat pemahaman manfaat implementasi kebijakan ditunjukkan pada Tabel IV.2 dimana 29 responden (43,9%) menjawab paham, 14 responden (21,2%) sangat paham, 19 responden (28,8%) kurang paham dan 4 responden (6,1%) menjawab tidak paham.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada umumnya implementor kebijakan banyak yang memahami manfaat kebijakan persampahan yang antar lain

untuk menciptakan budaya bersih bagi warga Kota Semarang. Disamping hal tersebut, ada 4 responden (6,1 %) yang menyatakan bahwa kebijakan persampahan manfaatnya dianggap tidak terlalu berpengaruh dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Suratman, S.ip Kepala Dinas Kebersihan Kota Semarang, diperoleh keterangan bahwa manfaat implementasi kebijakan persampahan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

“Manfaat kebijakan persampahan di Kota Semarang adalah untuk menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat, terjaganya kesehatan lingkungan dan tetap terjaganya kondisi Kota Semarang tetap bersih. Disamping hal tersebut pada gilirannya nanti akan tercipta budaya bersih bagi setiap warga Kota Semarang, cinta terhadap lingkungannya dan akhirnya sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

Sedangkan pemahaman tujuan implementasi kebijakan persampahan disajikan pada Tabel IV.3 dimana sebanyak 27 responden (40,9%) menjawab sangat paham 22 responden (33,3%) menjawab paham, 10 responden (15,2%) menjawab kurang paham dan 7 responden menjawab tidak paham. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya masyarakat Kota Semarang telah memahami tentang tujuan kebijakan persampahan di Kota Semarang. Sekalipun masih ada pula aparat impementor 7 responden (10,6 %) yang menilai bahwa masyarakat Kota Semarang tidak begitu paham terhadap tujuan program persampahan. Hal tersebut kebanyakan masyarakat pinggiran atau yang berdomisili di kawasan kumuh.

Tabel IV.3
Pemahaman Tujuan Implementasi Kebijakan Persampahan

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat paham	27	40,9
Paham	22	33,3
Kurang paham	10	15,2
Tidak paham	7	10,6
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Tingkat kemampuan aparat pelaksana kebersihan dalam menerjemahkan isi implementasi kebijakan persampahan ditunjukkan pada Tabel IV.4 dimana 20 responden (30,3%) menjawab mampu, 17 responden (25,7%) sangat mampu, 19 responden (28,8%) kurang mampu dan 10 responden (15,2%) menjawab tidak mampu.

Tingkat kemampuan aparat pelaksana kebersihan sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan persampahan. Dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa responden yang mampu maupun sangat mampu adalah mereka yang berlatar belakang pendidikan Sarjana. Sedangkan responden yang kurang mampu maupun tidak mampu, pada umumnya berlatar belakang pendidikan SLTA dan rata-rata belum pernah mendapatkan diklat teknis ataupun pelatihan kepemimpinan.

Berdasarkan pendapat Bapak Purwadi Ignatius, SH Kepala Cabang Dinas

Kebersihan, saat diwawancarai oleh penulis mengemukakan bahwa:

“Kendala-kendala yang masih menjadi permasalahan bagi aparat pelaksana kebersihan dalam menterjemahkan isi kebijaksanaan antara lain belum semua aparat pelaksana menerima diktat teknis. Kurangnya komunikasi dalam memberikan sosialisasi tentang persampahan, pembinaan dan pengendalian atau pengawasan di lapangan juga merupakan kendala yang perlu mendapatkan perhatian tersendiri”.

Tabel IV.4

Tingkat Kemampuan Aparat Pelaksana Kebersihan dalam Menterjemahkan Isi Implementasi Kebijakan Persampahan

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat mampu	17	25,7
Mampu	20	30,3
Kurang mampu	19	28,8
Tidak mampu	10	15,2
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota disajikan pada Tabel IV.5 dimana 21 responden (31,8%) menjawab terangkut semua, 17 responden (25,7%) menjawab terangkut sebagian besar, 21 responden (31,8%) menjawab terangkut sebagian kecil dan 7 responden menjawab tidak terangkut semua.

Ternyata dari 66 responden yang menyatakan bahwa sampah tidak terangkut semua, adalah kawasan-kawasan yang sulit dijangkau oleh mobil unit Dinas

Kebersihan dan dikelola sendiri oleh masyarakat. Dan masih ada pula wilayah-wilayah Kelurahan yang belum bisa dilayani oleh Dinas Kebersihan, mengingat masih kurangnya sarana/prasarana angkutan sampah, misalnya : kontainer, mobil unit sampah maupun becak sampah.

Menurut hasil wawancara mendalam dengan Bapak Untung Imam, ST Kepala Cabang Dinas Kebersihan Wilayah Timur dalam rangka mengatasi permasalahan tidak diambilnya beberapa produksi sampah, disebabkan sebagai berikut:

“Guna mengoptimalkan pengambilan sampah, telah diambil langkah-langkah yang cukup konkrit, yaitu dengan menambah jam lembur bagi petugas pengambil sampah. Kecuali hal tersebut sebaiknya pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Kebersihan harus mengambil langkah-langkah yang lebih konkrit, antara lain penambahan armada angkutan sampah, penambahan kontiner sampah. Terlebih dalam meningkatkan frekuensi pengambilan sampah serta menambah tenaga pengangkut sampah dari TPS ke TPA”.

Tabel IV.5

Pengangkutan Sampah oleh Dinas Kebersihan Kota

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Diangkut semua	21	31,8
Diangkut sebagian besar	17	25,7
Diangkut sebagian kecil	21	31,8
Tidak terangkut semua	7	10,7
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang frekuensi pengambilan sampah oleh

Dinas Kebersihan Kota disajikan pada Tabel IV.6 dimana 20 responden (30,3%) menjawab sangat sering, 30 responden (45,4%) menjawab cukup sering, 12 responden (18,2%) menjawab jarang dan 4 responden (6,1 %) menjawab tidak pernah.

Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Dinas Kebersihan Kota Semarang dalam pengambilan sampah belum semuanya terjangkau secara rutin. Hal ini disebabkan masih adanya kendala-kendala dalam pengambilan sampah. Kendala dimaksud antara lain kurangnya armada angkutan sampah maupun tenaga kerja angkut sampah, disamping itu pada umumnya tenaga angkut sampah masih banyak yang bersifat tenaga harian lepas, sehingga berpengaruh terhadap kinerjanya.

Menurut penjelasan dari Bapak Endra Marsantono Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Semarang Selatan masih ada kendala dalam proses pengambilan sampah. Lebih lanjut dikatakan sebagai berikut:

“Kendala dalam pengambilan sampah yang tidak rutin disebabkan oleh kurangnya tenaga angkut sampah, disamping pada umumnya tenaga tersebut masih Tenaga Pegawai Harian Lepas (TPHL), sehingga kinerjanya rendah. Pada umumnya pada lokasi-lokasi tertentu pengambilan sampah hanya dapat dilakukan satu minggu sekali dan bahkan ada yang sampai 2 minggu baru diambil, atau dengan perkataan lain jadwal pengambilan sampah tidak bisa rutin”.

Tabel IV.6
Frekuensi Pengambilan Sampah

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat sering	20	30,3
Cukup sering	30	45,4
Jarang	12	18,2
Tidak pernah	4	6,1
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang kondisi kebersihan Kota Semarang oleh Dinas Kebersihan Kota disajikan pada Tabel IV.7 di bawah ini, dimana 18 responden (27,3%) menjawab bersih sekali, 23 responden (34,8%) menjawab bersih, 17 responden (25,8%) menjawab kurang bersih dan 8 responden menjawab tidak bersih.

Dari jawaban responden yang menjawab bahwa wilayah Kota Semarang tidak bersih (8 responden atau 12,1 %), adalah responden yang berada di wilayah-wilayah kelurahan yang padat penduduk dan kawasan kumuh. Adapaun kawasan-kawasan yang masih kumuh antara lain wilayah kelurahan sepanjang pantai, kawasan-kawasan bantaran kali / sungai, komplek PKL, pasar, dan terminal bus atau angkutan kota.

Berdasarkan Indepth interview yang dilakukan penulis kepada Bapak Drs.

Arief Mulia Edi Camat Semarang Tengah, tentang kawasan-kawasan kumuh dan tidak bersih adalah:

“Kawasan-kawasan kota sekarang ini yang masih relatif tidak bersih adalah wilayah-wilayah disekitar pasar tradisional, kawasan-kawasan bantaran kali dan kawasan-kawasan dimana PKL tumbuh subur dan menempati wilayah-wilayah yang menjadi larangan, misal diatas trotoar, diatas saluran dan tepi-tepi jalan protokol. Disamping ditempat-tempat tersebut masih banyak lagi masyarakat Kota Semarang yang tidak peduli, karena buang sampah disembarang tempat, misal tepi jalan protokol, tempat-tempat umum dan lain-lain”.

Tabel IV.7
Kondisi Kebersihan Kota Semarang

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Bersih sekali	16	27,3
Bersih	23	34,8
Kurang bersih	17	25,8
Tidak bersih	8	12,1
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang masyarakat Kota telah melaksanakan budaya bersih disajikan pada Tabel IV.8 di bawah ini, dimana 10 responden (15,2%) menjawab sangat setuju, 25 responden (37,9%) menjawab setuju, 15 responden (22,7%) menjawab kurang setuju dan 16 responden (24,2%) menjawab tidak setuju.

Untuk menciptakan budaya bersih di kalangan warga Kota Semarang

memang masih banyak hambatan. Hal tersebut terbukti dari 66 responden terdapat 16 responden (24,2 %) yang menyatakan bahwa tidak setuju kalau warga Kota Semarang telah melaksanakan budaya bersih. Alasannya antara lain masih banyak warga Kota Semarang yang tidak peduli terhadap lingkungan, terutama kebiasaan membuang sampah masih banyak yang seenaknya atau disembarang tempat, disaluran, bantaran kali dan bahkan masih ada yang tidak mau menyediakan tong sampah.

Berdasarkan pengawasan budaya bersih yang dilakukan oleh warga Kota Semarang relatif masih rendah. Selanjutnya terkait dengan budaya bersih Ibu Sumbangsih, S.sos Kepala Kelurahan Palebon berpendapat bahwa:

“Perilaku warga kota yang menjadi kebiasaan dalam membuang sampah sesuai pada tempatnya, tidak pada sembarang tempat, sehingga keadaan wilayah kota semakin bersih. Adanya upaya masyarakat dengan mandiri untuk senantiasa mewujudkan lingkungannya bersih, tertata, rapi dan indah. Upaya-upaya tersebut dengan tumbuhnya gerakan kerja bakti rutin setiap saat tertentu, misal dengan acara Jum’at bersih atau Minggu bersih. Singkat kata, bahwa setiap warga kota memiliki sikap dan perilaku untuk senantiasa berpola hidup bersih, yang dimulai dari lingkungan keluarga dan meluas sampai ke lingkungan yang lebih luas, misal RT, RW dan wilayah Kelurahan dan seterusnya”.

Tabel IV.8
Masyarakat Kota Telah Melaksanakan Budaya Bersih

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat setuju	10	15,2
Setuju	25	37,9
Kurang setuju	15	22,7
Tidak setuju	16	24,2
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang kesesuaian retribusi kebersihan sesuai Perda disajikan pada Tabel IV.9 di bawah ini, dimana 16 responden (24,2%) menjawab sudahn sesuai, 25 responden (37,9%) menjawab sesuai, 15 responden (22,7%) menjawab kurang sesuai dan 10 responden menjawab sesuai.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa restribusi kebersihan telah sesuai degan peraturan daerah. Sementara responden yang menyatakan tidak sesuai Perda (15,2 %), dimungkinkan adanya pungutan tumbuhan yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu. Dala hal ini bisa terjadi pada pungutan PKL maupun pedagang kecil di pasar tradisional dan kios atau toko.

Tabel IV.9
Kesesuaian Retribusi Kebersihan dengan Perda

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat sesuai	16	24,2
Sesuai	25	37,9
Kurang sesuai	15	22,7
Tidak sesuai	10	15,2
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang kenaikan retribusi kebersihan Kota disajikan pada Tabel IV.10 di bawah ini, dimana 19 responden (28,8%) menjawab sangat setuju, 27 responden (40,9%) menjawab setuju, 13 responden (19,7%) menjawab tidak setuju dan 7 responden (10,6) menjawab kurang setuju.

Responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju bila retribusi kebersihan dinaikan, pada umumnya beralasan bahwa bila retribusi dinaikan maka pelayanan yang diebrikan Pemerintah Kota Semarang akan semakin baik.

Sementara yang menyatakan tidak setuju atau kurang setuju pada umumnya beralasan bahwa kinerja pelayanan pengambilan sampah yang dilakukan Dinas Kebersihan belum maksimal.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Bambang Supraptiyarso, SH, Kasubdin Retribusi Dinas Kebersihan, terkait dengan kenaikan

retribusi kebersihan berpendapat bahwa:

“Selama ini pemerintah kota dalam penerapan retribusi kebersihan masih dibawah standar Perda, terlebih pengenaan bagi kelompok masyarakat golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu pengenaan retribusi ini belum semua warga kota, masih terbatas bagi warga yang berlangganan PDAM karena penarikan lewat PDAM. Sementara bagi mereka yang tidak berlangganan PDAM / Non PDAM belum bisa dimaksimalkan. Pihak Dinas Kebersihan akan terus mencari terobosan dalam upaya meningkatkan retribusi kebersihan guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, terutama diprioritaskan pada usaha-usaha yang cukup besar misalnya pada pertokoan, tempat usaha, pasar swalayan dan perusahaan-perusahaan besar, dan sektor dunia usaha lainnya, dengan semakin tingginya pendapatan retribusi, maka satu sisi akan diupayakan peningkatan pelayanan sesuai standar minimal pelayanan publik”.

Tabel IV.10

Kenaikan Retribusi Kebersihan

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat setuju	19	28,8
Setuju	27	40,9
Kurang setuju	13	19,7
Tidak setuju	7	10,6
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang sanksi terhadap warga yang membuang sampah di sembarang tempat disajikan pada Tabel IV.11 di bawah ini, dimana 22 responden (33,3%) menjawab sangat setuju, 24 responden (36,4%) menjawab setuju, 9 responden (13,6%) menjawab kurang setuju dan 11 responden menjawab tidak setuju.

Sanksi membuang sampah di sembarang tempat yang telah ditetapkan dalam Perda, memang selama ini belum bisa diberlakukan. Berdasarkan pernyataan responden hanya ada 11 responden yang tidak setuju terhadap penerapan sanksi dari 66 responden. Dengan demikian cukup beralasan bila untuk menciptakan budaya bersih bagi warga Kota Semarang sangat perlu sekali penerapan sanksi sesuai Perda.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala kebersihan Kelurahan Krobokan, Bapak Dwi Haryanto, S.sos tentang penerapan sanksi membuang sampah secara ringkas dikemukakan:

“Penerapan sanksi ini masih pro dan kontra, sementara yang mendukung umumnya berpendapat guna mendidik dalam kedisiplinan dan tertib hukum, yang pada gilirannya akan mempercepat sikap masyarakat untuk menciptakan budaya bersih. Sementara disatu sisi sanksi tersebut memberatkan warga, terlebih ada sebagian warga yang berpendapat bahwa pelayanan kebersihan sudah merupakan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah”.

Tabel IV.11

Sanksi terhadap Warga yang Membuang Sampah di Sembarang Tempat

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat setuju	22	33,3
Setuju	24	36,4
Kurang setuju	9	13,6
Tidak setuju	11	16,7
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

A.2. Komunikasi

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang pemahaman tentang intensitas pemkot dalam penyampaian informasi kebijakan kebersihan sanksi terhadap warga yang membuang sampah di sembarang tempat disajikan pada Tabel IV.12 di bawah ini, dimana 22 responden (22,7%) menjawab sangat sering, 25 responden (37,9%) menjawab setuju, 15 responden (22,7%) menjawab kurang setuju dan 4 responden (6,1%) menjawab tidak setuju.

Rata-rata informasi yang disampaikan Pemkot dalam hal ini implementor kebijakan tingkat Kecamatan maupun Kelurahan rata-rata 1 kali dalam setiap bulannya melalui forum pertemuan rutin. Sementara responden yang menyatakan tidak pernah atau jarang pada umumnya mereka yang berdomisili di kawasan atau wilayah yang warganya sudah memahami kehidupan berbudaya bersih.

Tabel IV.12

Pemahaman tentang Intensitas Pemkot dalam Penyampaian Informasi Kebijakan Kebersihan

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat sering	22	33,3
Sering	25	37,9
Jarang	15	22,7
Tidak pernah	4	6,1
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang pemahaman tentang intensitas Pemkot dalam penyampaian informasi kebijakan kebersihan sanksi terhadap warga yang membuang sampah di sembarang tempat disajikan pada Tabel IV.13 di bawah ini, dimana 16 responden (24,2%) menjawab sangat jelas, 24 responden (36,4%) menjawab jelas, 18 responden (27,3%) menjawab cukup jelas dan 8 responden (12,1%) menjawab tidak jelas.

Data di atas menunjukkan bahwa informasi kebijakan persampahan pada umumnya dapat diterima oleh masyarakat Kota Semarang dengan baik dan jelas.

Menurut informasi yang diterima melalui hasil wawancara mendalam kepada Kepala Kelurahan Tambakharjo, Bapak Utomo, SH, bahwa untuk memperjelas pesan tentang kebijakan penanganan sampah, disarankan sebagai berikut:

“Guna mendapatkan umpan balik pesan yang disampaikan kepada masyarakat antara lain bisa ditempuh melalui penyebaran pamflet, brosur, sosialisasi Perda sampai kelompok masyarakat terkecil ditingkat RT/RW. Tidak kalah pentingnya melalui media cetak, elektronik atau pembuatan slogan berupa papan nama / baliho ditempat-tempat strategis”.

Tabel IV.13
Kejelasan Informasi Kebijakan Penanganan Sampah

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat jelas	16	24,2
Cukup jelas	24	36,4
Kurang jelas	18	27,3
Tidak jelas	8	12,1
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang konsistensi informasi tentang kebijakan penanganan sampah disajikan pada Tabel IV.14 di bawah ini, dimana 2 responden (3%) menjawab sangat konsisten, 13 responden (19,7%) menjawab konsisten, 39 responden (59,1%) menjawab kurang konsisten dan 12 responden (18,2%) menjawab tidak konsisten.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Aparat Pemda masih kurang konsisten dalam penyampaian informasi program kebersihan kepada masyarakat.

Tabel IV.14
Konsistensi Informasi tentang Kebijakan Penanganan Sampah

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat konsisten	2	3,0
Cukup konsisten	13	19,7
Kurang konsisten	39	59,1
Tidak konsisten	12	18,2
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang intensitas penggunaan media massa dalam sosialisasi tentang program kebersihan disajikan pada Tabel IV.15 di bawah ini, dimana 18 responden (27,3%) menjawab kontinyu, 16 responden (24,2%) menjawab cukup, 22 responden (33,3%) menjawab jarang dan 10 responden (15,2%) menjawab tidak pernah.

Dari hasil penelitian responden menyatakan bahwa media yang banyak digunakan adalah media Semarang terbitan Pemerintah Kota Semarang dan forum pertemuan warga.

Tabel IV.15
Intensitas Penggunaan Media Massa dalam Sosialisai tentang Program
Kebersihan

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Kontinyu	18	27,3
Cukup	16	24,2
Jarang	22	33,3
Tidak pernah	10	15,2
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan pemahaman tentang kebijakan kebersihan Kota disajikan pada Tabel IV.16 di bawah ini, dimana 18 responden (27,3%) menjawab sangat paham, 20 responden (30,3%) menjawab paham, 19 responden (28,8%) menjawab kurang paham dan 9 responden (13,6%) menjawab tidak paham.

Menurut pendapat responden bahwa masyarakat Kota Semarang pada umumnya cukup memahami isi kebijakan kebersihan Kota. Dan yang kurang memahami isi kebijakan kebersihan pada umumnya kelompok masyarakat yang marjinal berpendidikan relatif rendah dan berpenghasilan rendah.

Tabel IV.16
Pemahaman tentang Kebijakan Kebersihan Kota

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat paham	18	27,3
Paham	20	30,3
Kurang paham	19	28,8
Tidak paham	9	13,6
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang perlunya saresahan K3 dengan menghadirkan pejabat Pemkot Semarang disajikan pada Tabel IV.17 di bawah ini, dimana 21 responden (31,8%) menjawab sangat perlu, 18 responden (27,3%) menjawab cukup, 9 responden (13,6%) menjawab kurang perlu dan 18 responden (27,3%) menjawab tidak perlu.

Dapat disimpulkan bahwa ternyata banyak tanggapan dari responden yang menginginkan adanya forum sarasehan K-3 di tiap-tiap Kelurahan dengan menghadirkan pejabat-pejabat Pemerintah Kota yang terkait dengan pengelolaan kebersihan. Hal ini dipandang akan memacu tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya lebih meningkatkan kebersihan Kota Semarang sebagaimana pernah dilaksanakan ketika Kota Semarang akan meraih penghargaan Adipura.

Berdasarkan hasil interview mendalam kepada beberapa kepala Kelurahan masih relevan sekali bila diadakan sarasehan K-3 dengan menghadirkan pejabat

pemerintah kota. Salah satu pendapat tersebut dikemukakan oleh Bapak Wijanarko Kepala Kelurahan Plombokan, selanjutnya menyatakan bahwa:

“Sarasehan K-3 dipandang masih cukup bijak untuk dilaksanakan karena beberapa pertimbangan. Disamping sebagai media sosialisasi Perda dan program K-3, juga untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat tentang program kebersihan dan pengendalian sampah. Dalam forum tersebut juga sebagai media dialogis secara langsung antara pemerintah kota dengan masyarakat, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Kecuali hal tersebut segala permasalahan K-3 yang sedang terjadi di masyarakat, secara langsung dapat diketahui oleh Dinas / instansi terkait”.

Tabel IV.17

Perlunya Saresehan K3 dengan Menghadirkan Pejabat Pemkot Semarang

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat perlu	21	31,8
Cukup	18	27,3
Kurang perlu	9	13,6
Tidak perlu	18	27,3
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang adanya kritik dan saran terhadap kebijakan penanganan sampah di Kota Semarang disajikan pada Tabel IV.18 di bawah ini, dimana 15 responden (22,7%) menjawab banyak sekali, 26 responden (39,4%) menjawab cukup, 14 responden (21,2%) menjawab sedikit dan 11 responden (16,7%) menjawab tidak ada.

Dari hasil penelitian ternyata hanya 10 dari 66 responden yang menyatakan

tidak adanya kritik dan saran dari masyarakat terhadap kebijakan penanganan sampah. Dengan demikian, masih ada saran maupun kritik yang disampaikan oleh Pemerintah Kota, dalam pelaksanaan penanganan sampah antara lain berkaitan dengan intensitas pengambilan sampah, kurangnya persediaan kontainer dan kualitas pelayanan.

Terkait dengan saran ataupun kritik yang dilontarkan masyarakat atau pemerintah kota, menurut pendapat Bapak Drs. Kukuh Sudarmanto sekretaris Kecamatan Perungan adalah sebagai berikut:

“Banyaknya saran atau kritik yang dilontarkan oleh masyarakat justru akan memacu kinerja jajaran Dinas Kebersihan Kota. Kritik terbanyak antara lain menyoroti tentang pengambilan sampah yang dinilai tidak teratur dan kurang rutin, keadaan kebersihan kota yang masih kurang, penataan PKL dinilai tidak serius. Disamping hal-hal tersebut masih ada yang mengkritisi kurangnya kebersihan ditempat-tempat umum terutama pasar tradisional masih kumuh. Berdasarkan kritik-kritik tersebut pihak Dinas Kebersihan telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pelayanannya”.

Tabel IV.18
Adanya Kritik dan Saran terhadap Kebijakan Penanganan Sampah di Kota Semarang

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Banyak sekali	15	22,7
Cukup	26	39,4
Sedikit	14	21,2
Tidak ada	11	16,7
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

A.3 Variabel Sumber Daya

Dari hasil penelitian pada variabel sumber daya, implementor memberikan jawaban yang bervariasi, dimana pada pertanyaan tentang pendidikan formal yang dimiliki aparatur pelaksana kebijakan kebersihan ternyata 19 responden (28,8%) memberikan jawaban sangat memadai, 24 responden (36,4%) memberikan jawaban cukup memadai, 13 responden (19,7) memberikan jawaban kurang memadai dan 10 responden (15,1%) memberikan jawaban tidak memadai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Iv.19 di bawah ini.

Tabel IV.19**Pendidikan Formal yang Dimiliki Aparatur Pelaksana Kebijakan Kebersihan**

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat memadai	19	28,8
Cukup memadai	24	36,4
Kurang memadai	13	19,7
Tidak memadai	10	15,1
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang pemanfaatan pendidikan formal yang dimiliki aparatur pelaksana kebijakan kebersihan disajikan pada Tabel IV.20 di bawah ini, dimana 19 responden (28,8%) menjawab sangat baik, 26 responden (39,4%) menjawab baik, 14 responden (21,2%) menjawab kurang baik dan 7 responden menjawab tidak baik.

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata SDM atau aparat pelaksana kebijakan persampahan di Kota Semarang pada umumnya sudah cukup dan dapat dimanfaatkan dengan baik.

Tabel IV.20
Pemanfaatan Pendidikan Formal yang Dimiliki Aparatur Pelaksana Kebijakan Kebersihan

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat baik	19	28,8
Baik	26	39,4
Kurang baik	14	21,2
Tidak baik	7	10,6
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang pengetahuan dari aparatur kebijakan kebersihan tentang penanganan sampah disajikan pada Tabel IV.21 di bawah ini, dimana 19 responden (28,8%) menjawab sangat baik, 24 responden (36,4%) menjawab baik, 13 responden (19,7%) menjawab kurang baik dan 10 responden (15,1%) menjawab tidak baik.

Kesimpulan dari penelitian tentang pengetahuan dari aparatur pelaksana kebersihan rata-rata sudah mencukupi, sekalipun belum secara keseluruhan. Hal tersebut kemungkinan belum secara keseluruhan memperoleh pengetahuan teknis tentang cara penanganan sampah.

Tabel IV.21
Pengetahuan dari Aparatur Kebijakan Kebersihan tentang Penanganan Sampah

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat baik	19	28,8
Cukup baik	24	36,4
Kurang baik	13	19,7
Tidak baik	10	15,1
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang pemahaman tugas dan tanggung jawab dari aparatur kebijakan kebersihan tentang penanganan sampah disajikan pada Tabel IV.22 di bawah ini, dimana 18 responden (27,3%) menjawab sangat paham, 23 responden (34,8%) menjawab paham, 8 responden (12,1%) menjawab kurang paham dan 7 responden menjawab tidak paham.

Adanya aparat yang kurang memahami terhadap tugas dan tanggung jawabnya, kemungkinan berasal dari pegawai yang mempunyai latar belakang pendidikan rendah. Disamping itu, faktor pengalaman kerja kemungkinan juga sangat berpengaruh terhadap pemahaman tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Drs. Purwadi Ignatius, kepala Cabang Dinas Kebersihan Wilayah I, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan kinerja aparat yang menangani permasalahan sampah, kami menyarankan agar pemerintah kota secara berkala mengadakan refreasing pelatihan teknis diklat kepemimpinan. Hal tersebut terutama bagi pejabat baru dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan yang setiap saat mengalami pergantian / alih tugas. Kecuali hal tersebut lebih baik lagi bila pemerintah kota memberikan penghargaan baik berupa insentif atau uang lembur bagi para petugas pengambil sampah di lapangan. Tidak kalah pentingnya disamping hal-hal tersebut juga diadakannya studi banding keluar daerah yang telah berhasil dalam pengelolaan sampah”.

Tabel IV.22

**Pemahaman Tugas dan Tanggung Jawab dari Aparatur Pelaksana
Kebijakan**

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat paham	18	27,3
Cukup paham	23	34,8
Kurang paham	8	12,1
Tidak paham	17	25,8
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan kebijakan kebersihan disajikan pada Tabel IV.23 di bawah ini, dimana 14 responden (21,2%) 19 responden (28,8%) menjawab sangat memadai, 26 responden (39,4%) menjawab memadai, 19 responden (28,8%) menjawab kurang memadai dan 7 responden (10,6%) menjawab tidak memadai.

Dengan analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana prasarana penunjang pelaksana kebijakan kebersihan masih kurang memadai. Bagi

responden yang menjawab sangat atau cukup memadai, hal ini dimungkinkan bagi wilayah-wilayah kelurahan yang tingkat partisipasinya masyarakat cukup memberikan dukungan. Sebaliknya bagi responden yang menyatakan tidak memadai, kemungkinan wilayah kelurahan yang pelayanan pengambilan sampah selalu tersisa, dikarenakan produksi sampah relatif besar dan tidak terangkut semua setiap harinya.

Berdasarkan pendapat dari Bapak Suratman, S.ip, Kepala Dinas Kebersihan Kota, terhadap ketersediaan sarana prasarana kebersihan berpendapat bahwa:

“Untuk keberadaan sarana prasarana yang sampai saat ini dimiliki oleh Dinas Kebersihan dirasakan belum memadai. Sementara alat berat maupun mobil unit angkut sampah kondisinya banyak yang sudah tua, disamping dari segi jumlah masih belum mencukupi untuk menjangkau pelayanan kebersihan disemua wilayah kelurahan di Kota Semarang. Untuk hal tersebut telah diusulkan kepada pemerintah kota agar dalam setiap tahunnya dianggarkan penambahan sarana dan prasarana berupa mobil unit angkut sampah, kontiner, becak sampah maupun gerobak sampah termasuk pengadaan tong sampah untuk jalan-jalan protokol kota”.

Tabel IV.23

Sarana dan Prasarana Penunjang dalam Pelaksanaan Kebijakan Kebersihan

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat memadai	14	21,2
Cukup memadai	26	39,4
Kurang memadai	19	28,8
Tidak memadai	7	10,6
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang biaya operasional untuk kebersihan pengendalian sampah disajikan pada Tabel IV.24 di bawah ini, dimana 22 responden (12,1%) menjawab sangat memadai, 25 responden (37,9%) menjawab memadai, 11 responden (16,7%) menjawab kurang memadai dan 8 responden (12,1%) menjawab tidak memadai.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang menyatakan bahwa biaya operasional memadai dimungkinkan mereka adalah pejabat struktural yang mendapatkan tunjangan dinas dan tunjangan operasional. Akan tetapi bagi responden yang menyatakan bahwa dana operasional kurang atau tidak memadai, dimungkinkan mereka yang terlibat secara langsung mengelola pengambilan sampah dilapangan. Kenyataannya menunjukkan bahwa tidak semua wilayah Kota mendapatkan layanan kebersihan. Bahkan dalam penyapuan jalan masih dibentuk kelompok swadaya masyarakat untuk mendukung dana penyapuan jalan-jalan protokol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya operasional masih belum mencukupi.

Senada dengan pendapat Kepala Kelurahan Pindrikan baru Bapak Irawan Parlindungan, S.ip, yang menyampaikan alasan bahwa biaya operasional dikatakan belum memadai, lebih lanjut dikatakan:

“Selama ini pemerintah kota rupa-rupanya mengurangi biaya operasional penyapuan jalan-jalan protokol, yang semula dikerjakan oleh pihak ketiga (swasta). Kini pekerjaan tersebut diserahkan oleh KSM. Dengan pola yang sekarang ini masyarakat terbebani tambahan biaya untuk penyapuan jalan.

Dengan perkataan lain bahwa pemerintah kota mengurangi biaya operasional yang biasanya dikeluarkan oleh dinas, kemungkinan besar dana tersebut dialihkan ke sektor yang lain”.

Tabel IV.24

Biaya Operasional untuk Kebersihan Pengendalian Sampah

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat memadai	22	33,3
Cukup memadai	25	37,9
Kurang memadai	11	16,7
Tidak memadai	8	12,1
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang Fasilitas Umum Kebersihan Kota yang disediakan Pemkot disajikan pada Tabel IV.25 di bawah ini, dimana 17 responden (25,8%) menjawab sangat memadai, 15 responden (22,7%) menjawab memadai, 22 responden (33,3%) menjawab kurang memadai dan 12 responden (18,2%) menjawab tidak memadai.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas umum kebersihan yang disediakan Pemerintah Kota masih dalam batas-batas yang cukup memadai. Dimungkinkan pada tempat-tempat pelayanan umum perlu ditambahkan fasilitas tempat-tempat sampah yang cukup.

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Drs. Bambang

Supraptiyarso, Kasubdin Retribusi Dinas Kebersihan, dalam wawancara mendalam tentang keberadaan fasilitas umum kebersihan, mengemukakan saran dan pendapatnya sebagai berikut:

“Pemerintah kota mestinya harus memenuhi semua fasilitas kebersihan kota, misalnya tempat sampah ditempat umum, termasuk juga yang sering tidak diperhatikan adalah tempat MCK. Sebagai contoh di terminal, kompleks PKL dan jalan-jalan protokol ini seharusnya diprioritaskan. Sekalipun sekarang ini sudah ada, namun dilihat dari segi kuantitasnya perlu ditambahkan”.

Tabel IV.25

Fasilitas Umum Kebersihan Kota yang disediakan Pemkot

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat memadai	17	25,8
Cukup memadai	15	22,7
Kurang memadai	22	33,3
Tidak memadai	12	18,2
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang Peran KSM yang telah dibentuk dalam Penyapuan Jalan disajikan pada Tabel IV.26 di bawah ini, dimana 15 responden (22,7%) menjawab sangat baik, 28 responden (42,5%) menjawab cukup baik, 14 responden (21,2%) menjawab kurang baik dan 9 responden (13,6%) menjawab tidak baik.

Dari hasil penelitian tersebut diatas menunjukkan bahwa peran KSM dalam

penyapuan jalan cukup signifikan. Hal tersebut didorong oleh pemahaman masyarakat Kota terhadap isi dan maksud kebijakan persampahan. Disatu sisi dalam rangka mengoptimalkan dukungan masyarakat terkait dengan kurangnya biaya operasional.

Dari hasil indepth interview yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan Jerakah Ibu Endang Sri Suprapti, diperoleh keterangan tentang pendapatnya mengenai kendala dalam memerankan KSM adalah sebagai berikut:

“Kami masih mengalami kesulitan dalam memerankan kelompok swadaya masyarakat, terutama berkaitan dengan pengumpulan dana masyarakat. Bagi penduduk atau warga yang berdomisili di tepi jalan raya, kalau penduduknya berpenghasilan rendah agak kesulitan kalau ditarik swadaya secara rutin. Namun bagi pengusaha kadang-kadang sulit untuk diajak menanganinya”.

Tabel IV.26

Peran KSM yang telah Dibentuk dalam Penyapuan Jalan

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat baik	15	22,7
Cukup baik	28	42,4
Kurang baik	14	21,2
Tidak baik	9	13,6
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

A.4 Variabel Partisipasi

Hasil penelitian dari pertanyaan intensitas kritis dan saran masyarakat kepada Pemkot dalam pelayanan kebersihan disajikan pada Tabel IV.27 di bawah ini, dimana 27 responden (40,9%) menjawab sangat sering, 15 responden (22,7%) menjawab sering, 14 responden (21,2%) menjawab jarang dan 10 responden (15,2%) menjawab tidak pernah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih tingginya intensitas dan sarana yang dilontarkan kepada Pemkot dalam pelayanan kebersihan. Responden yang menyatakan sangat sering maupun menjawab sering, dimungkinkan terkait dengan kondisi pasar, tempat-tempat PKL pada lokasi yang tidak diijinkan maupun tempat-tempat layanan umum lainnya seperti terminal bus, rumah sakit maupun kawasan taman Kota.

Secara keseluruhan masih ada beberapa saran dan kritik yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah kota terkait dengan pelayanan kebersihan. Hal tersebut diungkapkan oleh Camat Semarang Utara Bapak Surahman S.ip, lebih lanjut saat diwawancarai mengatakan bahwa:

“Sekalipun pemerintah kota sudah berbuat cukup banyak dalam memberikan pelayanan kebersihan, namun ternyata masih banyak warga masyarakat yang melontarkan kritiknya. Adapun yang paling menonjol kritikan tersebut pada pelaksanaan pengambilan sampah, banyak sampah yang menumpuk, kinerja aparat Dinas Kebersihan terutama pengambilan sampah masih kurang, dan lainnya. Disamping hal tersebut masih ada pula sebagian warga Kota Semarang yang menilai bahwa Taman Kota tidak asri, kebersihan kota semakin menurun, gaung gerakan kerja bakti K-3 kurang, terlebih sosialisasi

K-3 juga dirasakan kurang”.

Tabel IV.27
Intensitas Kritis dan Saran Masyarakat kepada Pemkot dalam Pelayanan Kebersihan

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat sering	27	40,9
Sering	15	22,7
Jarang	14	21,2
Tidak pernah	10	15,2
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang tingkat keseringan masyarakat dalam menyusun program/ gagasan/ide disajikan pada Tabel IV.28 di bawah ini, dimana 14 responden (21,2%) menjawab sangat sering, 17 responden (25,8%) menjawab sering, 25 responden (37,9%) menjawab jarang dan 10 responden (15,1%) menjawab tidak pernah.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat (37,9 %) menyatakan bahwa masyarakat jarang menyusun program atau gagasan/ide. Kemungkinan hal ini disebabkan kurangnya informasi dan interaksi antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat. Sehingga gagasan atau program kebijakan persampahan tidak pernah mendapatkan perhatian masyarakat. Kemungkinan juga disebabkan Pemerintah

Kelurahan tidak proaktif mendorong partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kebersihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis kepada Kasubdin Perencanaan Dinas Kebersihan Bapak Drs. Mardiyanto, pada umumnya program / gagasan / ide dalam penanganan sampah dikemukakan sebagai berikut:

“Sudah selayaknya kalau pemerintah Kelurahan atau tingkat Kecamatan dapat menjembatani aspirasi masyarakat dalam program penanganan sampah melalui forum-forum lembaga kemasyarakatan. Selama ini masih banyak Kelurahan yang kurang pro aktif dalam menanggapi program penanganan sampah. Oleh karena itu diharapkan agar semua Lurah mampu memanfaatkan forum temu warga di lingkungan Kelurahan, RT dan RW untuk membahas program penanganan masalah kebersihan tersebut masuk dalam agenda pembahasan”.

Tabel IV.28

Tingkat Keseringan Masyarakat dalam Menyusun Program/ Gagasan/Ide

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat Sering	14	21,2
Sering	17	25,8
Jarang	25	37,9
Tidak pernah	10	15,2
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang partisipasi masyarakat dalam penyediaan sarana kebersihan / tong sampah disajikan pada Tabel IV.29 di bawah

ini, dimana 15 responden (22,7%) menjawab baik sekali, 26 responden (39,4%) menjawab cukup, 14 responden (21,2%) menjawab kurang dan 11 responden (16,7%) menjawab tidak ada.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam penyediaan sarana kebersihan/tongsampah cukup. Adanya responden yang menyatakan kurang (21,2%) dan menjawab tidak ada (16,7 %), dimungkinkan bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh pelayanan kebersihan. Disamping itu kemungkinan juga mereka membuang sampah dengan cara dibakar atau membuat lubang sampah di halaman sendiri.

Tabel IV.29

Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Sarana Kebersihan / Tong Sampah

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Baik sekali	15	22,7
Cukup	26	39,4
Kurang	14	21,2
Tidak ada	11	16,7
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang partisipasi dukungan dana masyarakat guna menunjang program kebersihan disajikan pada Tabel IV.30 di bawah ini, dimana 12 responden (18,2%) menjawab sangat baik, 23 responden (34,8%) menjawab cukup baik, 19 responden (28,8%) menjawab kurang baik dan 12 responden (18,2%) menjawab tidak baik.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan dana pada umumnya termasuk cukup baik. Sementara responden yang menyatakan tidak baik sebesar (18,2%), hal ini dimungkinkan bagi masyarakat yang termasuk golongan ekonomi lemah, terlebih bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Rata-rata dukungan dana untuk menunjang operational kebersihan per KK antara Rp. 1.000,- s/d Rp. 3.000,- setiap bulannya.

Tabel IV.30**Partisipasi Dukungan Dana Masyarakat guna Menunjang Program Kebersihan**

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Cukup baik	12	18,2
Tidak baik	23	34,8
Kurang baik	19	28,8
Sangat baik	12	18,2
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang partisipasi masyarakat dalam bentuk material dalam penanganan sampah disajikan pada Tabel IV.31 di bawah ini, dimana 15 responden (22,7%) menjawab sangat baik, 23 responden (34,9%) menjawab cukup baik, 19 responden (28,8%) menjawab kurang baik dan 9 responden (13,6%) menjawab tidak baik.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa warga Kota Semarang pada umumnya cukup baik tingkat partisipasinya dalam bentuk material. Sementara yang menyatakan tidak baik ada (13,6 %) dari 66 responden. Hal tersebut dimungkinkan pada masyarakat yang tingkat perekonomiannya rendah dan kurang memahami maksud dan sisi kebijakan. Bentuk partisipasi material antara lain batu, pasir, semen atau lainnya guna menunjang pembangunan sarana/prasaran penanganan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ibu Eko Sri Anjarani, SH,

Kepala Kelurahan Tugurejo, bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang berupa material guna menunjang gerakan K-3 disebutkan:

“Untuk menunjang gerakan K-3 ditingkat Kelurahan memang sangat dibutuhkan sekali partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut beraneka ragam bentuknya antara lain berupa dana / uang, tenaga, pikiran dan bahkan dalam bentuk material. Partisipasi dalam bentuk material pada umumnya untuk menunjang kegiatan fisik. Partisipasi tersebut antara lain bisa berupa pengadaan bahan bangunan seperti; semen, pasir, batu dan lain-lain; pengadaan tong sampah, pengadaan alat angkut sampah misalnya becak sampah, gerobak dan sapu. Selain itu juga dapat berupa peralatan kerja bakti berupa cangkul, sabit dan lain sebagainya”.

Tabel IV.31

Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Material dalam Penanganan Sampah

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat baik	15	22,7
Cukup baik	23	34,9
Kurang baik	19	28,8
Tidak baik	9	13,6
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang intensitas keaktifan masyarakat dalam kerja bakti K3 disajikan pada Tabel IV.32 di bawah ini, dimana 28 responden (42,4%) menjawab sangat baik, 19 responden (28,8%) menjawab cukup baik, 12 responden (18,2%) menjawab kurang baik dan 7 responden (10,6%) menjawab tidak baik.

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya

intensitas keaktifan masyarakat dalam kerja bakti K-3 adalah baik. Namun masih ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak baik (10,6 %). Hal ini dimungkinkan justru dari kalangan masyarakat elit tertentu misal pejabat pemerintah, pengusaha, pedagang dan lain-lain.

Menurut pendapat kepala Kelurahan Purwoyaso, Bapak Sutrisno, SH menyebutkan:

“Aktivitas kerja bakti K-3 yang dilakukan masyarakat pada umumnya dilakukan secara bervariasi. Namun setidaknya-tidaknya dilakukan satu bulan sekali dengan melibatkan semua warga masyarakat. Terkecuali dalam keadaan yang mendesak kemungkinan bisa dilakukan lebih dari sekali dalam setiap bulannya”.

Tabel IV.32

Intensitas Keaktifan Masyarakat dalam Kerja Bakti K3

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat baik	28	42,4
Cukup baik	19	28,8
Kurang baik	12	18,2
Tidak baik	7	10,6
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang tingkat penyerapan masyarakat terhadap informasi kebijakan tentang penanganan sampah/ kebersihan disajikan pada Tabel IV.33 di bawah ini, dimana 19 responden (28,8%) menjawab baik, 19

responden (28,8%) menjawab cukup, 23 responden (34,8%) menjawab sedang dan 5 responden (7,6 %) menjawab kurang.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat penyerapan masyarakat terhadap informasi kebijakan tentang penanganan sampah/ kebersihan pada umumnya baik. Hal ini dimungkinkan tingkat pengetahuan warga masyarakat relatif cukup tinggi. Disamping itu masyarakat perKotaan banyak menggunakan media cetak maupun elektronika dalam penyerapan informasi. Adanya responden yang menyatakan kurang dalam tingkat penyerapan informasi (7,6%), dimungkinkan oleh karena kurang tersedianya media informasi.

Tabel IV.33

Tingkat Penyerapan Masyarakat terhadap Informasi Kebijakan tentang Penanganan Sampah/ Kebersihan

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Baik	19	28,8
Cukup	19	28,8
Sedang	23	34,8
Kurang	5	7,6
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Hasil penelitian dari pertanyaan tentang efektivitas KSM kebersihan yang telah dibentuk dalam upaya penanganan sampah/ kebersihan disajikan pada Tabel IV.34 di bawah ini, dimana 24 responden (36,4%) menjawab sangat efektif, 13

responden (19,7%) menjawab cukup efektif, 15 responden (22,7%) menjawab kurang efektif dan 14 responden (21,2%) menjawab tidak efektif.

Dari hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas menunjukkan bahwa (36,4 %) responden menyatakan bahwa tingkat efektifitas KSM kebersihan dinilai sangat efektif. Hal ini dimungkinkan karena pengelolaan cukup transparan. Hasil kinerja KSM dapat mewujudkan upaya untuk membantu pemerintah Kota dalam menangani masalah kebersihan Kota. Sementara responden yang menjawab tidak efektif (21,2%), hal tersebut dipandang bahwa KSM merupakan beban biaya tinggi terhadap masyarakat. Disamping itu adanya asumsi bahwa pelayanan kebersihan merupakan tanggung jawab pemerintah Kota, karena masyarakat sudah ditarik retribusi kebersihan.

Salah satu responden yang merupakan informan dalam wawancara mendalam, yaitu Sri Mulyanto, SH. Kepala Kelurahan Karangayu Kecamatan Semarang Barat berpendapat:

“Keberadaan KSM sebenarnya sangat efektif dalam membantu tugas-tugas pemerintah khususnya program kebersihan. Namun tidak semua KSM tersebut efektif. Ada beberapa KSM yang menanggung penyapuan jalan-jalan tertentu kurang efektif. Pada umumnya yang menjadi kendala bagi pengurus KSM antara lain kurangnya dana untuk penyapuan, hal ini dikarenakan pengurus tidak mampu mendorong atau memberikan motivasi kepada masyarakat dalam menumbuhkan prakarsa dan swadaya. Terlepas dari itu menurut pengalaman yang terjadi disini kadang-kadang iuran rutin yang telah ditetapkan pengurus, tidak selalu rutin disetorkan, bahkan banyak warga tidak aktif iuran”.

Tabel IV.34
Efektivitas KSM Kebersihan yang telah Dibentuk dalam Upaya Penanganan Sampah/ Kebersihan

Keterangan	Frekuensi	Persen (%)
Sangat efektif	24	36,4
Cukup efektif	13	19,7
Kurang efektif	15	22,7
Tidak efektif	14	21,2
Jumlah	66	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

B. Hubungan Antar Variabel yang diuji

Setelah disajikan data dari masing-masing variabel penelitian, untuk memperjelas hubungan antara variabel komunikasi, partisipasi dan sumber daya dengan implementasi kebijakan persampahan disajikan dengan tabel silang. Selanjutnya guna menganalisis data hubungan antara variabel komunikasi, partisipasi dan sumber daya dengan implementasi kebijakan persampahan dilakukan uji hipotesis. Untuk uji ini dilakukan uji korelasi antar variabel, tetapi sebelum dilakukan uji korelasi ini dilakukan dulu uji normalitas, uji reliabilitas dan uji validitas data.

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah masing-masing variabel adalah tidak normal. Untuk menunjukkan normalitas data bisa dilihat nilai *Lilliefors*

Significance Correction yang sama dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut mempunyai ciri-ciri distribusi tidak normal dan syarat untuk digunakan korelasi Rank Kendall akan terpenuhi. Hasil uji normalitas disajikan pada Tabel IV. 35 di bawah ini:

Tabel IV. 35
Uji Normalitas / Tests of Normality

	Kolmogorof-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Komunikasi	.190	66	.021*
Partisipasi	.109	66	.052
Sumber Daya	.105	66	.022*
Implementasi Kebijakan	.112	66	.040

*. This is upper bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Berdasarkan Tabel IV.35 di atas terlihat bahwa nilai signifikansi untuk variabel komunikasi, partisipasi, sumber daya dan implementasi kebijakan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi, partisipasi, sumber daya dan implementasi kebijakan mempunyai distribusi tidak normal.

Sedangkan uji reliabilitas adalah untuk menunjukkan apakah indikator/pertanyaan dari variabel yang diteliti mempunyai sifat ajeg atau tetap. Syarat

instrumen reliabel adalah nilai koefisien Cronbach alpha lebih besar dari r tabel product moment (dengan $df=n - k$, dan $\alpha 5\%$). Dari hasil perhitungan maka koefisien Cronbach alpha semuanya di atas r tabel= 0,208 ($df= 0,208$, $\alpha=0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang diuji telah mempunyai ciri-ciri reliabel. Secara detail dapat terlihat pada lampiran 4.

Uji validitas akan menunjukkan apakah item soal dalam sebuah instrumen penelitian atau indikator-indikator dalam satu variabel sudah tepat. Ketepatan alat ukur ini dapat dilihat dari tingkat korelasi antara indikator/pertanyaan dengan total skor pada variabel yang sama. Apabila r hasil perhitungan (Corrected Item-Total Correlation) lebih besar dari r tabel product moment, maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut telah tepat untuk mengukur variabel tersebut. Dengan menggunakan r tabel product moment=0,208 yang telah dicari sebelumnya, dari hasil perhitungan melalui bantuan SPSS 10.0 maka koefisien korelasi (r) untuk semua item pertanyaan adalah lebih dari harga 0,208 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan tersebut adalah valid dan instrumen penelitian dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian (dapat dilihat pada Lampiran 4).

B.1 Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan Persampahan

Hubungan variabel komunikasi dengan implementasi kebijakan persampahan disajikan pada Tabel IV.36 di bawah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

sebagian besar responden menyatakan terdapat hubungan antara variabel komunikasi dengan implementasi kebijakan persampahan, di mana komunikasi dan implementasi yang sangat baik (50%) dan (56,5%) dikategorikan baik, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa komunikasi yang baik mempunyai korelasi terhadap meningkatnya implementasi kebijakan persampahan. Meskipun demikian hubungan ini nampaknya tidak murni karena ada beberapa responden yang mempunyai komunikasi terhadap implementasi kebijakan ternyata mempunyai komunikasi yang kurang terhadap implementasi kebijakan persampahan. Untuk mengetahui secara detail dapat dilihat tabel IV.36 berikut ini.

Tabel IV.36
Hubungan Komunikasi dan Implementasi Kebijakan Persampahan

Tingkat Implementasi	Tingkat Komunikasi				Total
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
Sangat Baik	50% (2)	26.1% (6)	3.8% (1)	0% (0)	13.6% (9)
Baik	50% (2)	56.5% (13)	46.2% (12)	38.5% (5)	48.5% (32)
Cukup	0% (0)	13.0% (3)	46.2% (12)	30.8% (4)	28.8% (19)
Kurang	0% (0)	(1) 4.3%	(1) 3.8%	(4) 30.8%	(6) 9.1%
Total	100% (N = 4)	100% (N = 23)	100% (N = 26)	100% (N = 13)	100% (N = 66)

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Untuk mengindikasikan adanya hubungan antara kedua variabel di atas digunakan Kendall Rank Test, dimana disyaratkan signifikansi Kendall's tau-b $< 0,05$. Dari hasil pengujian hubungan antara komunikasi dengan implementasi kebijakan persampahan dapat dibuktikan bahwa keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Berdasarkan output perhitungan diketahui bahwa signifikansi Kendall's tau-b sebesar 0,001 sehingga syarat untuk terjadi hubungan terpenuhi (signifikansi $< 0,05$). Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang kuat antara komunikasi dengan implementasi kebijakan persampahan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.37

Tabel IV.37
SIGNIFIKASI KENDALL'S TAU-B

Keterangan	Nilai
Kendall's tau-b	0,429
Signifikansi	0,001

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

B.2. Hubungan Variabel Sumber Daya dengan Implementasi Kebijakan Persampahan

Hubungan antara variabel sumber daya dengan implementasi kebijakan persampahan disajikan pada Tabel IV.38 di bawah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan terdapat hubungan antara variabel sumber daya dengan implementasi kebijakan persampahan, di mana sumber daya dan implementasi yang sangat baik (75%) dan (52,2 %) di kategorikan baik, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa sumber daya yang baik mempunyai korelasi terhadap meningkatnya implementasi kebijakan persampahan. Meskipun demikian hubungan ini nampaknya tidak murni karena ada beberapa responden yang menyatakan bahwa hubungan sumber daya kurang terhadap implementasi kebijakan persampahan. Untuk mengetahui secara detail dapat dilihat tabel IV.38 berikut ini.

Tabel. IV. 38

Hubungan Sumber Daya dan Implementasi Kebijakan Persampahan

Tingkat Implementasi	Tingkat Komunikasi				Total
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
Sangat Baik	(3) 75%	(3) 13.0%	(1) 3.8%	0% (0)	(7) 10.6%
Baik	0% (0)	(12) 52.2%	(5) 19.2%	(4) 30.8%	(21) 31.8%
Cukup	(1) 25.0%	(6) 26.1%	(17) 65.4%	(3) 23.1%	(27) 40.9%
Kurang	0% (0)	(2) 8.7%	(3) 11.5%	(6) 46.2%	(11) 16.7%
Total	(N = 4) 100%	(N = 23) 100%	(N = 26) 100%	(N = 13) 100%	(N = 66) 100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Untuk mengindikasikan adanya hubungan antara kedua variabel di atas digunakan Kendall Rank Test, dimana disyaratkan signifikansi Kendall's tau-b < 0,05. Dari hasil pengujian hubungan antara sumber daya dengan implementasi kebijakan persampahan dapat dibuktikan bahwa keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Berdasarkan output perhitungan diketahui bahwa signifikansi Kendall's tau-b sebesar 0,001 sehingga syarat untuk terjadi hubungan terpenuhi (signifikansi < 0,05). Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang kuat antara komunikasi dengan implementasi kebijakan persampahan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.39

Tabel IV.39
SIGNIFIKASI KENDALL'S TAU-B

Keterangan	Nilai
Kendall's tau-b	0,401
Signifikansi	0,001

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

B.3 Hubungan Variabel Partisipasi Masyarakat dengan Implementasi Kebijakan Persampahan

Hubungan antara variabel partisipasi dengan implementasi kebijakan persampahan disajikan pada Tabel IV.40 di bawah ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan terdapat hubungan antara variabel partisipasi dengan implementasi kebijakan persampahan, di mana partisipasi dan implementasi yang sangat baik (50,%) dan (65,2 %) di katagorikan baik, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa partisipasi yang baik mempunyai korelasi terhadap meningkatnya implementasi kebijakan persampahan . Meskipun demikian hubungan ini nampaknya tidak murni karena ada beberapa responden yang mempunyai partisipasi terhadap implementasi kebijakan persampahan ternyata mempunyai partisipasi yang kurang terhadap implementasi kebijakan persampahan. Untuk inengetahui secara detail dapat dilihat tabel IV.40 berikut ini.

Tabel. IV. 40
Hubungan Partisipasi dan Implementasi Kebijakan Persampahan

Tingkat Implementasi	Tingkat Partisipasi				Total
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
Sangat Baik	(2) 50%	(3) 13.0%	(1) 3.8%	0% (0)	(6) 9.1%
Ba ik	0% (0)%	(15) 65.2%	(13) 50%	(1) 7.7%	(29) 43.9%
Cukup	(2) 50%	(5) 21.7%	(7) 26.9%	(6) 46.2%	(20) 30.3%
Kurang	0% (0)	0% (0)	(5) 19.2%	(6) 46.2%	(11) 16.7%
Total	(N = 4) 100%	(N = 23) 100%	(N =26) 100%	(N = 13) 100%	(N = 66) 100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Untuk mengindikasikan adanya hubungan antara kedua variabel di atas digunakan Kendall Rank Test, dimana disyaratkan signifikansi Kendall's tau-b < 0,05. Dari hasil pengujian hubungan antara partisipasi dengan implementasi kebijakan persampahan dapat dibuktikan bahwa keduanya mempunyai hubungan yang kuat. Berdasarkan output perhitungan diketahui bahwa signifikansi Kendall's tau-b sebesar 0,001 sehingga syarat untuk terjadi hubungan terpenuhi (signifikansi < 0,05). Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang kuat antara komunikasi dengan

implementasi kebijakan persampahan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.41 berikut.

Tabel IV.41
SIGNIFIKASI KENDALL'S TAU-B

Keterangan	Nilai
Kendall's tau-b	0,365
Signifikansi	0,001

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

B4. Hubungan Komunikasi, Sumber Daya dan Partisipasi dengan Implementasi Kebijakan Persampahan (Hubungan ganda)

Dari hasil perhitungan didapatkan koefisien uji konkordansi Kendall adalah 0,82 dengan signifikansi 0,001. Chi Square tabel untuk tingkat signifikansi 95 % dan degree of freedom ($df = 3$) adalah sebesar 7,82. Hasil hitung uji signifikansi Chi Square adalah 16,273 sehingga Chi Square hitung lebih besar dari Chi Square tabel (χ^2 hitung $>$ χ^2 tabel). Dari hasil uji korelasi konkordansi Kendall tersebut telah dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan ada hubungan antara variabel komunikasi, partisipasi dan sumber daya terhadap implementasi kebijakan persampahan secara berganda diterima. Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan tabel konkordansi Kendall tersebut di bawah ini :

Tabel VI. 42
Konkordansi Kendall's
Hubungan Antara Variabel Komunikasi, Sumber daya dan Partisipasi
Terhadap Implementasi Kebijakan Persampahan
(Analisis Konkordansi Kendall)

N	66
Kendall's Konkordansi (W)	0,82
Chi-Square hitung	16,273
Chi-Square tabel (95%)	7,82
Df	3
Asymp. Sig	0,001

Kendall's Coefficient of Concordance

Sumber : Data primer yang diolah, 2004

Dari hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa nilai Konkordansi Kendall's W mempunyai nilai 0,82, yang berarti sumbangan dari variabel bebas (komunikasi, sumber daya dan partisipasi) terhadap variabel dependen (implikasi kebijakan persampahan) adalah kuat karena mendekati 1.

C. Diskusi

Secara teoritis bahwa ketiga variabel yaitu komunikasi, sumber daya dan partisipasi merupakan variabel penentu dalam implementasi kebijakan. Dan setelah dilakukan pengujian di lapangan didapatkan bahwa komunikasi dengan implementasi

kebijakan mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,429 dengan tingkat signifikan 95% (lihat tabel IV. 37), sehingga dapat diinterpretasikan bahwa komunikasi dengan implementasi kebijakan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan.

Sumber daya mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,401 dengan derajat signifikan 95% (lihat tabel IV. 39), sehingga dapat diinterpretasikan bahwa sumber daya dengan implementasi kebijakan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan.

Sementara partisipasi mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,365 dengan tingkat signifikan 95% (lihat tabel IV. 41), sehingga dapat diinterpretasikan bahwa sumber daya dengan implementasi kebijakan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan.

Adapun hubungan komunikasi, sumber daya dan partisipasi dengan implementasi kebijakan persampahan secara bersama-sama mempunyai koefisien korelasi uji konkordansi sebesar 0,82 dengan tingkat signifikansi 95% (lihat tabel IV.42), sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis yang menyatakan ada hubungan positif dan signifikan antara variabel komunikasi, sumber daya dan partisipasi dengan implementasi kebijakan persampahan secara berganda dapat diterima.

Walaupun demikian hasil penelitian dari ketiga variabel tersebut merupakan bagian terkecil dari faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan, sedangkan faktor-faktor lain yang menentukan implementasi kebijakan diluar

variabel penelitian dimungkinkan berupa faktor politik, budaya birokrasi, organisasi, manajemen dan lainnya.

Oleh karena itu untuk dapat mengimplementasikan kebijakan persampahan di Kota Semarang secara maksimal, pemerintah Kota Semarang perlu mengambil langkah-langkah konkrit dan strategis yaitu dengan menerapkan paradigma kebijakan publik, yaitu semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota harus mencerminkan dan memihak kepentingan masyarakat luas. Strategi tersebut hendaknya searah dengan arah reformasi administrasi negara yaitu efisiensi, efektif, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara komunikasi dengan implementasi kebijakan persampahan di kota Semarang. Dari 66 responden antara 50% sampai 56% menyatakan setuju bahwa diperlukannya komunikasi yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan persampahan di kota Semarang. Sedangkan analisis dari koefisien rank kendall tau menunjukkan hasil angka besaran korelasi 0,429 dengan nilai signifikansi = 0,001, ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kedua variabel di atas. Nilai korelasi 0,429 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif, jadi baik-buruknya implementasi kebijakan persampahan salah satunya adalah dipengaruhi oleh tingkat komunikasi. Semakin tinggi tingkat komunikasi akan mengakibatkan semakin baik pula implementasi kebijakan persampahan di kota Semarang dan sebaliknya.
2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara sumber daya dengan implementasi kebijakan persampahan di kota Semarang. Dari 66 responden ternyata relatif antara 52% samapai 75% responden menyatakan setuju bahwa diperlukan kemampuan sumber daya yang handal dalam pelaksanaan penanganan sampah atau mengimplementasikan kebijakan persampahan di kota Semarang.

Sedangkan analisis dari koefisien rank kendall tau menunjukkan hasil angka besaran korelasi 0,401 dengan nilai signifikansi = 0,001, ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kedua variabel di atas. Nilai korelasi 0,401 menunjukkan hubungan yang kuat dan positif, jadi keberhasilan implementasi kebijakan persampahan di kota Semarang salah satunya adalah dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya. Semakin tinggi kemampuan sumber daya akan mengakibatkan semakin baik pula implementasi kebijakan persampahan di kota Semarang dan sebaliknya.

3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara partisipasi masyarakat dengan implementasi kebijakan persampahan di kota Semarang. Dari 66 responden ternyata relatif antara 50% sampai 65% responden menyatakan setuju bahwa diperlukan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan penanganan sampah atau mengimplementasikan kebijakan persampahan di kota Semarang. Sedangkan analisis dari koefisien rank kendall tau menunjukkan hasil angka besaran korelasi 0,365 dengan nilai signifikansi = 0,001, ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara kedua variabel di atas. Nilai korelasi 0,365 menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif, jadi keberhasilan implementasi kebijakan persampahan di kota Semarang salah satunya adalah dipengaruhi oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat akan mengakibatkan semakin baik pula implementasi kebijakan persampahan di kota Semarang dan sebaliknya.
4. Ada hubungan yang positif dan signifikan secara bersama-sama (simultan) antara

variabel komunikasi, sumber daya dan partisipasi dengan implementasi kebijakan persampahan di kota Semarang. Bukti adanya hubungan secara bersama-sama tersebut dapat dilihat dari hasil perhitungan dimana didapatkan koefisien uji konkordansi Kendall adalah 0,82 dengan signifikansi 0,001. Chi Square tabel untuk tingkat signifikansi 95 % dan degree of freedom ($df = 3$) adalah sebesar 7,82. Hasil hitung uji signifikansi Chi Square adalah 16,273 sehingga Chi Square hitung lebih besar dari Chi Square tabel (χ^2 hitung $>$ χ^2 tabel). Adapun nilai koefisien konkordansi Kendall sebesar 0,82 menunjukkan bahwa tingkat hubungan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent* adalah kuat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka berikut ini akan disampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam rangka mewujudkan implementasi kebijakan persampahan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Agar masyarakat memahami isi /manfaat dan kebijakan persampahan, hendaknya dilakukan langkah-langkah sosialisasi kebijakan kepada masyarakat. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi tersebut antara lain adalah:

- a. Mengadakan forum interaktif antara Pemerintah Kota yang terdiri dari Unsur Dinas Kebersihan dan Dinas-dinas terkait dengan masyarakat dimasing-

masing Kelurahan se-Kota Semarang secara berkala (sarasehan K-3).

- b. Penyebaran luasan informasi kebijakan persampahan dalam hal ini Perda no.6 tahun 1993 tentang kebersihan dalam wilayah Kotamadya Semarang dalam bentuk leaflet, pamflet, papan nama slogan maupun melalui media masa baik berupa media cetak ataupun media elektronik.

2. Partisipasi

Guna menumbuhkan partisipasi masyarakat agar implementasi kebijakan persampahan dapat berjalan efektif, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Agar masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Termasuk dalam hal menanggapi adanya kritik, saran dan pendapat dari komponen masyarakat terhadap implementasi kebijakan persampahan di Kota Semarang.
- b. Meningkatkan frekuensi keterlibatan sektor swasta (pengusaha) dalam proses penanganan persampahan di Kota Semarang.

3. Sumber Daya

Meskipun Pemerintah Kota Semarang mempunyai aparatur dan sumber daya yang cukup, nampaknya belum dapat mencapai kinerja kebijakan yang optimal dalam mengimplementasikan kebijakan persampahan. Terkait dengan hal tersebut maka perlu diambil langkah-langkah:

- a. Peningkatan kemampuan aparatur dengan memperbanyak frekuensi pelatihan / diklat teknik, kursus-kursus, seminar dan tugas belajar terutama bagi aparat implementor kebijakan persampahan.
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan antara lain penambahan: mobil

unit angkut sampah, gerobak / becak sampah, kontiner sampah dan lain-lain baik kuantitas maupun kualitasnya.

- c. Perlunya peningkatan beaya operasional melalui APBD guna menunjang operasional pengambilan sampah.

Disamping ketiga hal tersebut di atas, nampaknya yang tidak kalah pentingnya agar kebijakan persampahan dapat berjalan dengan baik, adanya komitmen dan dukungan politik secara konkrit baik dari elit eksekutif maupun legislatif Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahao, Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, 2001*, edisi kedua, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdul Wahab, Solichin, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, 1997*, Cetakan Pertama, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Arif, Mirrian S, *Buku Materi Pokok Organisasi dan Manajemen*, 1985, Karunika Jakarta.
- Ancok, Jamaludin, *Teknik Penyusunan Skala Pengukuran*, 1985, PPK-UGM, Yogyakarta.
- Bryant, Carolie, dan White, Louise G. *Managing Development in the Third World*, ; 1982, Westview Press, Boulder, Colorado.
- Edward III, George C, *Implementary Public Policy*, 1980, Congressional Duancerly Press, Washington DC.
- Grindle, M (ed). *Politics and Policy Implementation in the Third World*, 1980, Princeton University Press.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 1987, Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 1989, Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta.
- Hamidjojo, Santoso, S. *Partisipasi dalam Pembangunan 1977*, Penerbit Universitas Padjajaran, Bandung.
- Hewlett M, dan Rames M, *Studying Public Policy, Policy deles and Policy Subs is fern*, 1995, Oxford University Press, Toronto.
- Huneryager, S. G. dan Heckmann, *Human Relations in Management*, 1967, South Western Publ, New York.
- , Perda Kotamadya Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang *Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang*.
- , Keputusan Walikota Semarang Nomor 061. 181 Tahun 2001 tentang *Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan Kota Semarang*.
- Islami, Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, 2001*, edisi kedua, cetakan kesepuluh, Bumi Aksara, Jakarta.
- Islamy, Irfan, *Analisis Implementasi Kebijakan*, 1986, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.
- Koentjaraningrat, *Kedudukan Mentalitet dan Pembangunan*, 1982, Gramedia, Jakarta.
- Martin. H. Manser, *Oxford Leaners Pocket Dictionary*, 1995, New Editioan, Oxford University Press.
- Masud, Modi, Edwin B. Flippo, 1999, *Manajemen Personalialia*, Edisi Keenam, Erlangga, Jakarta.

- Moleong, Lexy, J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2001, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mubiyarto, *Strategi Pembangunan Pedesaan Pusat Penelitian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan*, 1984, UGM, Yogyakarta.
- N Dhara, Talizadhuhu, *Pengembangan Masyarakat*, 1978, Bina Aksara, Jakarta.
- Quaede, ES, *Analysis for Public Decision*, 1984, Edition fourth Printing, Elsevier Sciene Publishing, New York.
- Robbin, Stephan, *Perilaku Organisasi*, 1991, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Robert Eyestone, *The Threads of Policy : A Study in Policy Leadership*, 1971, Bobbs Merril, Indianapolis.
- Silalahi, Oberlin, *Beberapa Aspek Kebijakan Negara*, 1989, Liberty, Yogyakarta.
- Simmamora, Henry, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1999, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, 2001, ALFABETA, Bandung
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Adminislrasi*, 2001, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*, 1994, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Thoha, Miftah, *Pembinaan Organisasi: Proses Diagnosa dan Intervensi*, 1999, Rajawali Press, Jakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Teori dan Strategi Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Tjokrowinoto, Mulyato, *Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskman*, 1996, Jakarta.
- Tjokro winoto, Moeljarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, 1996, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Tri Cahyono, Bambang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1996, Badan Penerbit
- Wilcok, David, *the Guide to Effective Participation*, 1994, Partnership Books 13 Pelham Square, Brighton 4 ET (Internet, Fax 01273677379).
- William N. Dunn, *Analysis Kebijakan Publik*, 1992, Cetakan Pertama, Penerbit Gajah Mexia University Press, Yogyakarta.
- 'Wvasa<i>, *Azas-azas Manajemen*, 1986, Alumni, Bandung. V/inamo Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, 1981, Penerbit Transito, Bandung